

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 (DINAS KESEHATAN)

URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

2. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi daerah yaitu **“Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Bersaing Internasional”** sedangkan misi yang terkait dengan bidang kesehatan adalah misi ke-tiga yaitu **“Meningkatkan pemerataan yang Berkeadilan”**.

Untuk mencapai visi dan misi daerah Sumatera Selatan tersebut, Dinas Kesehatan dituntut untuk mempunyai visi, misi dan strategi, sasaran, program kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan kemudian dilaksanakan melalui Rencana Kerja Tahunan. Bidang kesehatan, sesuai dengan kebijakan yang ada merupakan salah satu kewenangan wajib yang pelaksanaannya sudah diserahkan ke daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka keberhasilan pembangunan kesehatan, ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan kepada data (*evidence based*) dan permasalahan yang ada. Program kesehatan yang disusun harus responsif dan akomodatif terhadap masalah kesehatan spesifik daerah termasuk aspirasi masyarakat tentang pembangunan kesehatan daerah.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan keseluruhan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan berbagai program pembangunan kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk menyusun program pembangunan kesehatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Program kesehatan yang disusun harus tetap mengacu kepada prioritas dan fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk menjamin terlaksananya pembangunan kesehatan yang lebih efektif dan efisien serta tercapainya tujuan/output yang telah ditetapkan, maka diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan melibatkan kerjasama serta komitmen dari berbagai lintas sektor terkait. Pembangunan kesehatan tidak akan berhasil mencapai tujuannya bila hanya dilaksanakan oleh sektor kesehatan saja, oleh karena itu sangat diperlukan keikutsertaan semua pihak untuk keberhasilan pembangunan kesehatan ke depan.

Sebagai salah satu bukti keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan, maka pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan beberapa penghargaan di bidang kesehatan yaitu :

1. Juara I Tingkat Nasional Dokter Teladan untuk Inovasi Terbaik diraih **dr. Yuliarni Hasan, M. Kes** Kepala Puskesmas Kampus Kota Palembang
2. Juara III Tingkat Nasional Kategori Tenaga Kesehatan Masyarakat atas nama **Hairil Jhonson, SKM** dari Puskesmas Padjar Bulan, Muara Enim
3. 10 Besar Tenaga Medis Farmasi dari Puskesmas Pegayut Ogan Ilir atas nama **Leni Marlina, AMF**
4. 10 Besar untuk Tenaga Medis Bidan Desa atas nama **Gandes Wentiyani, Am.Keb** Puskesmas Air Sugihan 25 OKI
5. Juara I Nasional Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tatanan Rumah Tangga yakni **Desa Lalang Sembawa Kabupaten Banyuasin**, Desa ini juga dinobatkan sebagai Desa Sehat Tingkat Nasional Tahun 2016 *versi Majalah Tempo*
6. Pemenang Lomba PHBS Tatanan Rumah Tangga Pakarti Madya I dengan Kategori Kota yakni **Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih**
7. Posyandu Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2016, Kategori Kota Pakarti Madya I yaitu Kamboja IX beralamat di **Kelurahan Majapahit Kecamatan Prabumulih Timur**
8. Pemenang Posyandu Pakarti Madya II Kategori Kabupaten diperoleh Wijaya Kusuma II dari **Desa Ternate di Kecamatan SP Padang – OKI**
9. Tanaman Obat Keluarga (TOGA) mendapatkan Juara II Tingkat Nasional Kategori Kota untuk Kelompok Melati yang beralamat di **Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih**
10. **Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumsel** masuk TOP 35 Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOFIK) Kementerian Reformasi Birokrasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2016
11. **SMKN 3 Musi Banyuasin**, Pemenang Lomba Kesehatan Tingkat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Tingkat Nasional
12. **Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Sumatera Selatan**, meraih Akreditasi Institusi Balai Kepelatihan Kesehatan dengan Nilai Skor Tertinggi se-Indonesia Tahun 2013 dan Tahun 2016 dari Kementerian Kesehatan RI
13. **Hj. Sri Utari, SPd, SKM, M. Kes** sebagai Widyaiswara Tingkat Nasional Tahun 2016 dari Kementerian Kesehatan RI

Penghargaan tersebut diatas diberikan atas inovasi program kesehatan yang dikembangkan di Sumatera Selatan, dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap kesehatan yang dibuktikan dengan alokasi anggaran kesehatan serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam sektor kesehatan.

2.1. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

Program dan Kegiatan pembangunan kesehatan tahun anggaran 2016 pada SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang dibiayai oleh dana APBD Provinsi Sumatera Selatan meliputi :

**Tabel 1. Program dan Kegiatan Bersumber APBD Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016**

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.667.635.000	14.174.235.000
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.900.000	17.770.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.591.208.000	2.960.928.000
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	59.400.000	46.200.000
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.880.567.000	2.880.567.000
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	300.000.000	300.000.000
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200.000.000	200.000.000
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	250.000.000	250.000.000
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	40.000.000	32.000.000
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	214.000.000	225.305.000
1.10	Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran	4.830.250.000	6.166.600.000
1.11	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	66.000.000	66.000.000
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, ke luar daerah dan luar negeri	1213.310.000	1.028.865.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.800.500.000	2.774.900.000
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.500.000	294.500.000
2.2	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Rumah Tangga	86.000.000	0
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	1.480.000.000	1.480.000.000
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	100.000.000	100.000.000
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000	250.000.000
2.6	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	750.000.000	600.400.000
2.7	Rehabilitasi Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Gedung Kantor	0	50.000.000

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
3	PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	1.036.030.000	482.780.000
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	300.000.000	190.000.000
3.2	Penempatan dan Penarikan dokter/ dokter gigi PTT	50.000.000	0
3.3	Pendampingan dan Monitoring evaluasi dokter internship	101.500.000	101.500.000
3.4	Monitoring evaluasi program tugas belajar	50.900.000	0
3.5	Pelatihan Jabatan Fungsional	286.920.000	191.280.000
3.6	Pembinaan dan akreditasi pelatihan kesehatan di Kabupaten / Kota	124.150.000	0
3.7	Sertifikasi ISO 9001 Tahun 2008 Dinkes dan UPT	122.560.000	0
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	135.560.000	135.560.000
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.560.000	15.560.000
4.2	Pembinaan dan Pengukuran capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kab/ Kota	120.000.000	120.000.000
5	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	6.802.989.500	6.202.989.500
5.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.802.989.500	6.202.989.500
6	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.811.844.816	2.480.193.816
6.1	Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana	102.480.000	102.480.000
6.2	Pemilihan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan	200.634.000	200.634.000
6.3	Fasilitasi Tim Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	166.980.000	51.780.000
6.4	Penyediaan Ruang Laktasi di Tempat Kerja	51.721.316	51.721.316
6.5	Fasilitasi Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sumatera Selatan	823.642.000	497.642.000
6.6	Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan dan kebugaran	159.300.000	0
6.7	Pembinaan teknis monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan olahraga di Kab/Kota	76.388.000	76.388.000
6.8	Pemeriksaan kebugaran jasmani bagi karyawan/ti Pemprov. Sumsel	180.650.000	0
6.9	Pelatihan GELS untuk perawat emergency	137.600.000	0

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
6.10	Sosialisasi Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA) Provinsi Sumsel	87.880.000	87.880.000
6.11	Pertemuan Evaluasi Pelayanan Darah Aman	102.600.000	75.600.000
6.12	Pertemuan DOTS TB dan MDR /XDR di RS	68.600.000	68.600.000
6.13	Pembinaan dan Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi (RSSIB)	194.940.000	179.940.000
6.14	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Kabupaten/ Kota	166.420.000	0
6.15	Pembinaan dan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas di Kab/Kota	102.458.500	102.458.500
6.16	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi	171.850.000	171.850.000
6.17	Pembinaan Pengelola Program Puskesmas	62.396.000	0
6.18	Pelatihan dokter kesehatan pertandingan	122.725.000	0
6.19	Deteksi dini gangguan pendengaran dan ketulian pada masyarakat	55.720.000	55.720.000
6.20	Pelatihan tenaga kesehatan tentang Program Kesehatan Khusus	137.100.000	0
6.21	Peningkatan kapasitas pengelola Program UKS di Kab/ Kota	32.260.000	0
6.22	Fasilitasi Rumah Singgah UPTD BKOKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	607.500.000	607.500.000
6.23	Operasional Kegiatan Jantung Sehat	0	150.000.000
7	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	73.300.000	0
7.1	Pemetaan Obat Asli / Tradisional Indonesia	73.300.000	0
8	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	845.751.000	728.551.400
8.1	Penyebarluasan Informasi Pola Hidup Sehat	300.000.000	222.000.000
8.2	Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian desa/ kelurahan siaga aktif dan PHBS	365.751.000	326.551.400
8.3	Pemberdayaan Pramuka Saka Bakti Husada	180.000.000	180.000.000
9	PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	2.492.276.600	2.392.276.600
9.1	Penyediaan Bahan Tambahan Makanan dan Vitamin untuk Penanggulangan Kurang Gizi	2.168.436.600	2.168.436.600
9.2	Penyediaan Sarana untuk Penanggulangan KEP,AGB,KVA,GAKY dan Zat Mikro Lainnya	100.000.000	0
9.3	Pembinaan dan Penilaian Program Gizi	223.840.000	223.840.000

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
10	PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	385.185.000	304.660.000
10.1	Pengembangan Lingkungan Sehat	137.815.000	90.400.000
10.2	Peningkatan mutu kesehatan lingkungan	126.690.000	93.580.000
10.3	Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	120.680.000	120.680.000
11	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	2.924.285.500	1.983.711.500
11.1	Penyemprotan /Fogging sarang nyamuk	381.675.000	381.675.000
11.2	Peningkatan Imunisasi	273.183.300	273.183.300
11.3	Pengadaan Program Imunisasi	188.183.200	188.183.200
11.4	Pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR)	198.220.000	100.000.000
11.5	Pengadaan Reagen Pemeriksaan HIV	255.000.000	0
11.6	Pengadaan Kelambu Berinsektisida	340.300.000	0
11.7	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (PPBB)	328.590.000	268.740.000
11.8	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	399.725.000	271.990.000
11.9	Pembinaan Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular	208.164.000	208.164.000
11.10	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	200.680.000	141.211.000
11.11	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji	150.565.000	150.565.000
12	STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	275.160.000	100.000.000
12.1	Pembinaan dan Fasilitasi Akreditasi Rumah Sakit	100.000.000	100.000.000
12.2	Pembinaan dan Fasilitasi Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan	175.160.000	0
13	PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS/RS JIWA/RS PARU/RS MATA	139.487.838.084	51.229.110.384
13.1	Pembangunan Rumah Sakit Provinsi	135.413.746.000	47.655.018.300
13.2	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	3.374.092.084	3.124.092.084
13.3	Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah	250.000.000	250.000.000
13.4	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain – lain)	200.000.000	0
13.5	Pengadaan Bahan – Bahan Logistik Rumah Sakit	250.000.000	200.000.000

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
14	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	200.000.000	200.000.000
14.1	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	150.000.000	150.000.000
14.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeluer Rumah Sakit	50.000.000	50.000.000
15	KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	1.181.360.000	681.200.000
15.1	Pengawasan Rujukan Puskesmas untuk Program Jamsoskes Sumsel Semesta	241.200.000	241.200.000
15.2	Pertemuan Forum Komunikasi JPKM	69.760.000	20.000.000
15.3	Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta	800.000.000	400.000.000
15.4	Rapat Koordinasi dalam Rangka Persiapan Integrasi Program Jamsoskes Sumsel Semesta ke JKN	70.400.000	20.000.000
16	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK LANSIA	158.639.500	158.639.500
16.1	Pembinaan dan Penilaian Posyandu Lansia Tingkat Provinsi	108.452.000	108.452.000
16.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Pelayanan Kesehatan Lansia	50.187.500	50.187.500
17	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	974.200.000	834.200.000
17.1	Pembinaan dan Pengawasan Sarana dan Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kab/ Kota	500.000.000	460.000.000
17.2	Pembinaan dan Pengawasan Produk Pangan Industri Pabrikan	324.200.000	224.200.000
17.3	Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman di Restoran / Hotel	150.000.000	150.000.000
18	PENINGKATAN PELAYANAN KESELAMATAN IBU DAN ANAK	444.573.000	321.573.000
18.1	Pemilihan Bidan Teladan Tingkat Provinsi	89.990.000	89.990.000
18.2	Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi	157.522.000	157.222.000
18.3	Pembinaan dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	123.000.000	0

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
18.4	Peningkatan Dukungan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	22.148.000	22.148.000
18.5	Kampanye Peduli Kesehatan Ibu	51.913.000	51.913.000
19	PENDIDIKAN KESEHATAN	1.190.300.000	940.300.000
19.1	Pendidikan Akademi Kesehatan Lingkungan	1.190.300.000	940.300.000
20	PENANGANAN KELUARGA BERENCANA	519.474.000	116.280.000
20.1	Pengadaan Alat Kontrasepsi	403.194.000	0
20.2	Pembinaan dan Pendampingan Penanganan Keluarga Berencana	116.280.000	116.280.000
21	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BLUD	23.932.400.000	43.733.000.000
21.1	Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RSK Mata & Paru	23.932.400.000	42.933.000.000
21.2	Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RSK Gigi dan Mulut	0	800.000.000
	TOTAL	202.339.302.000	129.974.160.700

Sumber : Laporan Keuangan untuk APBD Tahun 2016 Prov. Sumsel

Pada tabel diatas, total program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 adalah sebanyak 21 program dimana 17 diantaranya adalah program yang terkait langsung dengan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan di tingkat Provinsi serta dengan total 101 jenis kegiatan yang ada di dalamnya. Alokasi anggaran Belanja Langsung yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2016 semula adalah sebesar Rp. 202.339.302.000,00 dalam APBD Induk dan mengalami perubahan menjadi Rp. 129.974.160.700,00 pada APBD Perubahan.

Jika dilihat dari alokasi dana yang tersedia menurut program di Dinas Kesehatan, anggaran terbesar digunakan untuk pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata, yaitu mencapai 39 % dari total anggaran yang tersedia. Anggaran tersebut digunakan untuk Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan, pengadaan alat – alat Kesehatan Rumah Sakit dan pengadaan bahan – bahan Logistic Rumah Sakit .

Program berikutnya yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD, yaitu sebesar 33.64% dari total anggaran. Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD, yaitu Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat dan Rumah Sakit Khusus Paru serta Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.

Program lainnya yang mendapatkan alokasi anggaran cukup besar di Dinas Kesehatan adalah Program Perbaikan Gizi Masyarakat (1,84%) dimana anggaran tersebut digunakan untuk

melakukan penyediaan bahan makanan tambahan dan vitamin untuk penanggulangan kurang gizi.

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui anggaran bersumber dari Dana APBN melalui anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan selama tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Program dan Kegiatan Bersumber APBN Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016**

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
1	2	3	4
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN	3.410.700.000	3.410.700.000
1.1	Pembinaan administrasi kepegawaian Kementrian Kesehatan	205.400.000	205.400.000
1.2	Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan Barang Milik Negara	136.500.000	136.500.000
1.3	Perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan	1.791.800.000	1.791.800.000
1.4	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan dan Gaji	180.400.000	180.400.000
1.5	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	851.600.000	851.600.000
1.6	Peningkatan Kesehatan Jama'ah Haji	245.000.000	245.000.000
2	PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN KESEHATAN NASIONAL	1.604.163.000	1.604.163.000
2.1	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/ KIS	1.604.163.000	1.604.163.000
3	PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	1.891.488.000	1.891.488.000
3.1	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	271.476.000	271.476.000
3.2	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	743.417.000	743.417.000
3.3	Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	467.730.000	467.730.000
3.4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	201.496.000	201.496.000
3.5	Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	80.941.000	80.941.000
3.6	Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	126.428.000	126.428.000

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
1	2	3	4
4	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	11.094.017.000	9.984.615.000
4.1	Surveilans dan Karantina Kesehatan	3.060.071.000	2.889.399.000
4.2	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	1.965.774.000	1.780.883.000
4.3	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2.461.262.000	2.202.849.000
4.4	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	3.206.910.000	2.711.484.000
4.5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	400.000.000	400.000.000
5	PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	52.224.676.000	35.948.130.000
5.1	Pembinaan Gizi Masyarakat	8.376.490.000	7.394.710.000
5.2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2.265.000.000	2.265.000.000
5.3	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.002.000.000	3.095.550.000
5.4	Pembinaan Kesehatan Keluarga	25.244.216.000	13.298.012.000
5.5	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.545.138.000	3.795.384.000
5.6	Penyehatan Lingkungan	6.809.532.000	6.099.474.000
6	PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN	7.589.823.000	5.834.157.000
6.1	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	862.943.000	862.943.000
6.2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	413.088.000	413.088.000
6.3	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.328.189.000	827.901.000
6.4	Dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	1.846.274.000	1.550.624.000
6.5	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	2.167.959.000	1.381.601.000
6.6	Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	971.370.000	798.000.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)	6.081.552.000	6.081.552.000
7.1	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	1.045.420.000	1.045.420.000
7.2	Pelatihan SDM Kesehatan	3.295.216.000	3.295.216.000
7.3	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	1.201.800.000	1.201.800.000
7.4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	539.116.000	539.116.000
	JUMLAH	83.914.119.000	64.754.805.000

Sumber : Laporan Keuangan untuk APBN Tahun 2016 Prov. Sumsel

Pada tabel diatas, total anggaran APBN yang diterima melalui dana Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 64.754.805.000,00, Anggaran APBN tersebut digunakan untuk pelaksanaan 7 jenis program dan 34 jenis kegiatan.

Alokasi anggaran terbesar yang diterima adalah untuk Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu Rp. 35.948.130.000,- atau sekitar 55,51% dari seluruh total anggaran bersumber APBN. Program ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan MDG's yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta menurunkan kasus Balita Gizi buruk dan gizi kurang.

2.2. CAPAIAN HASIL, SASARAN DAN REALISASI PELAKSANAAN

A. REALISASI ANGGARAN APBD

Sampai dengan Desember 2016, total anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang diterima melalui dana APBD sebesar Rp.170.957.050.700,00, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 40.982.890.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 129.974.160.700,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersumber dari anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

- I. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 40.982.890.000,00, dimana sampai akhir tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 40.693.231.401,00 (99,29%). Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan gaji pokok PNS, tunjangan pegawai dan tambahan penghasilan bagi PNS.
- II. Belanja Langsung sebesar Rp. 129.974.160.700,00, sampai dengan Desember 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 105.818.836.690,00 (81,42%) dan realisasi fisik program dan kegiatannya mencapai 98,97%. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Total anggaran pada program pelayanan dan administrasi perkantoran ini sebesar Rp. 14.174.235,00, dengan realisasi keuangannya pada tahun 2016 mencapai Rp. 13.411.819.629,00 (94,62%) serta dengan realisasi fisiknya mencapai 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program pelayanan administrasi perkantoran adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 17.770.000,00, dengan realisasi anggaran pada tahun 2016 mencapai Rp. 17.770.000,00 (100%), dengan realisasi fisik mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat sebanyak 3.900 surat, meterai sebanyak 1.900 lembar, prangko dan benda pos lainnya sebanyak 3.900 lembar untuk 12 bulan.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran yang diterima sebesar Rp. 2.960.928.000,00, dengan realisasi anggaran pada tahun 2016 mencapai Rp. 2.735.713.338,00 (92,39%) dan realisasi fisiknya mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan. Jumlah rekening listrik, telepon dan air pada Dinas Kesehatan dan UPT sebanyak 47 rekening.
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp. 46.200.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 46.200.000,00 (100%) dan realisasi fisiknya telah mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah terbayarnya honorarium tenaga pengelola keuangan selama 12 bulan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah tenaga pengelola keuangan yang dibayarkan honornya sebanyak 13 orang.
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 2.880.567.000,00, serta dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 2.599.367.600,00 (90,24%) dan realisasi fisiknya mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel dan UPT selama 1 tahun. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan peralatan kebersihan kantor dan penyediaan jasa kebersihan kantor/cleaning service.
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 286.137.700,00 (95,38%) dan realisasi fisiknya mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dinas kesehatan selama 12 bulan dengan 38 jenis alat tulis kantor bagi Dinas Kesehatan dan UPT.
- f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 191.075.500,00 (95,54%) dan realisasi fisik mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan di lingkungan dinas kesehatan selama 1 tahun dengan 60 jenis bahan cetakan (formulir, blangko, buku & kartu) dan penggandaan di Dinas Kesehatan dan UPT.
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 242.291.000,00 (96,92%) dengan realisasi fisiknya sudah mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor pada dinas kesehatan selama 12 bulan dengan 18 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Kesehatan dan UPT.
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 32.000.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 31.361.300,00 (98%) dan realisasi fisik mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Keluaran dari

kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada Dinas Kesehatan dan UPT selama 12 bulan dengan 4 jenis bahan bacaan / majalah di kantor Dinas Kesehatan dan UPT.

- i. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaran sebesar Rp. 225.305.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 182.555.250,00 (81,03%) dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman untuk rapat/pertemuan, makanan dan minuman tamu, makanan dan minuman harian pegawai serta makanan dan minuman pasien rumah sakit khusus mata masyarakat, rumah sakit khusus gigi & mulut dan rumah sakit khusus paru.
- j. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp. 6.166.600.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 5.984.785.000,00 (97,05%) dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah terbayarnya honorarium tenaga honorer di Dinas Kesehatan sebanyak 159 orang, jasa dokter/dokter gigi PTT sebanyak 30 orang dan jasa tenaga bidan PTT sebanyak 40 orang selama 1 tahun.
- k. Penyediaan Jasa Tutor SKJ, dengan anggaran sebesar Rp. 66.000.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 66.000.000,00 (100%) dan realisasi fisiknya mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah terbayarnya honorarium tenaga tutor SKJ untuk mendukung honorarium instruktur senam kesegaran jasmani di lingkungan Dinkes dan UPT selama 1 tahun dengan jasa tutor SKJ sebanyak 5 orang.
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 1.028.865.000,00, dengan realisasi tahun 2016 anggaran mencapai Rp. 1.028.562.941,00 (99,97%) dan realisasi fisiknya mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi program ke dalam daerah, luar daerah dan luar negeri selama 1 tahun pada dinas kesehatan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Total anggaran pada program ini sebesar Rp. 2.774.900.000,00, dengan realisasi anggaran pada tahun 2016 mencapai Rp. 1.607.016.218,00 (57,91%), dengan realisasi fisiknya mencapai 98,20%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 294.500.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 140.365.450,00 (47,66%) dan realisasi fisiknya mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor dinas kesehatan selama 1 tahun dengan 14 jenis peralatan dan perlengkapan kantor.

- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional, dengan anggaran sebesar Rp.1.480.000.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp.1.218.603.768,00 (82,34%) dan realisasi fisiknya mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas untuk Dinas Kesehatan dan UPT selama 1 tahun dengan 59 unit kendaraan dinas operasional roda empat untuk Dinkes dan UPT dan 120 unit kendaraan roda dua Dinkes dan UPT.
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 80.424.000,00 (80,42%) dan realisasi fisiknya mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan rumah tangga selama 1 tahun dengan 2 jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga Dinkes dan UPT.
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 165.630.000,00 (66,25%) dan realisasi fisiknya mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor di Balpekes, RSK Mata, RSK Paru, RSK Gigi & Mulut, BKOM dan Dinas Kesehatan selama 1 tahun.
- e. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.600.400.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 1.993.000,00 (0,33%) dan realisasi fisiknya mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini Rehabilitasi dari gedung Dinas Kesehatan dan UPT yang selesai direhabilitasi
- f. Rehab Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Listrik Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00, tidak terealisasi karena waktu tidak mencukupi untuk pelaksanaan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Total anggaran pada program ini sebesar Rp. 482.780.000,00, dengan realisasi anggaran pada tahun 2016 mencapai Rp. 366.891.800,00 (76%), dengan realisasi fisiknya mencapai 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan anggaran sebesar Rp.190.000.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 177.715.000,00 (93,53%), dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan, melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Karyawan Dinas Kesehatan dan UPT yang mengikuti kursus singkat dan pelatihan sebanyak 15 orang.

- b. Pendampingan dan monitoring evaluasi dokter internship, dengan anggaran sebesar Rp.101.500.000,00, dengan realisasi anggaran pada tahun 2016 mencapai Rp.101.456.800,00 (99,96%) , dengan realisasi fisik mencapai 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi Program Dokter Interenship Daerah.
- c. Pelatihan Jabatan Fungsional, dengan anggaran sebesar Rp. 191.280.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 87.720.000 (45,86%), dengan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatkan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan jabatan fungsional sebanyak 30 orang.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Total anggaran pada program ini sebesar Rp. 135.560.000,00, dengan realisasi anggaran pada tahun 2016 mencapai Rp. 134.601.500,00 (99,29%), dengan realisasi fisiknya mencapai 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 15.560.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 14.942.500,00 (96,03%), dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya 3 dokumen laporan kinerja SKPD Dinas Kesehatan Prov. Sumsel.
- b. Pembinaan dan Pengukuran Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kab/ Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 119.659.000,00 (99,72%), dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 laporan hasil capaian kinerja standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Total anggaran pada program ini sebesar Rp. 6.202.989.500,00, dengan realisasi anggarannya pada tahun 2016 mencapai Rp. 846.979.696,00 (13,65%), serta dengan realisasi fisik telah mencapai 100%. Sasaran Program adalah terjaminnya ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan bagi penduduk melalui penyediaan obat buffer stock Kabupaten/Kota, kebutuhan obat program dan rumah sakit khusus paru dan mata masyarakat, kebutuhan bahan kimia rumah sakit, menjamin/ meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat yang bermutu bagi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan petugas Kabupaten/Kota di bidang pelayanan farmasi komunitas dan Rumah Sakit serta melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu, kemanfaatan, keamanan dan kerasionalannya.

Pada tahun 2016, indikator yang terkait dengan program obat dan perbekalan kesehatan dapat dilihat dari pencapaian hasil kinerja program sebagai berikut:

❖ Persentase ketersediaan obat dan Vaksin di Puskesmas sesuai kebutuhan : 96%

Berdasarkan indikator di atas, maka pencapaian kinerja program pada tahun 2016 ini secara keseluruhan masih perlu mendapatkan perhatian untuk dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan tersebut. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai dengan kebutuhan capaiannya pada tahun 2016 baru mencapai 73%, hal ini menurun dari tahun 2015 sebesar 76,28% dan juga belum mencapai target untuk tahun 2016 sebesar 96%. Rendahnya pencapaian tersebut dikarenakan ;

1. Kesiapan dari penyedia obat untuk memenuhi kebutuhan obat di Puskesmas tidak sesuai dengan rencana kebutuhan
2. perubahan indikator ketersediaan obat dari 144 item obat menjadi 20 item obat dan tidak semua Puskesmas dan kab/kota wajib untuk melaporkan ketersediaan obat.

Upaya yang dilakukan agar ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai kebutuhan dengan melakukan ;

1. Menyampaikan permasalahan tersebut dalam bentuk bersurat ke Kementerian Kesehatan dan LKPP
2. Memberikan masukan ke LKPP untuk batas waktu kontrak pengadaan obat sampai akhir tahun berjalan, dan pemberian sanksi bagi penyedia yang melanggar ketentuan.
3. Membuat surat edaran dari Kadinkes Prov. Ke kab/kota untuk melaporkan ketersediaan obat di seluruh Puskesmas dengan format yang baru.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dalam program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari satu kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 6.202.989.500,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 846.979.696,00 (13,65%), dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya 300 item obat penunjang buffer stock, obat penunjang untuk RS gigi dan mulut dan obat program penanggulangan masalah kesehatan, obat untuk RSK Mata, RSK Paru dan Bahan Kimia.

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Total anggaran pada program ini sebesar Rp. 2.480.193.816,00, dengan realisasi anggaran pada tahun 2016 mencapai Rp. 1.821.177.611,00 (73,43%), dengan realisasi fisiknya mencapai 86,76%.

Sesuai dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, sasaran dari program ini adalah terjaminnya ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Hasil pencapaian indikator kinerja dan target pada program upaya kesehatan masyarakat selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Pencapaian
1	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olah raga	110 PKM	100 PKM
2	Persentase Kab / Kota yang telah melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja	80%	80%
3	Cakupan Kab / Kota yang melaksanakan Program Bina Yankestradkom, alternatif dan Komplementer	86%	100%
4	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Bebas Pasung bagi Pasien yang mengalami Gangguan Jiwa	85%	100%
5	Jumlah Kasus Pasung	40 Kasus	175 Kasus
6	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Upaya Kesehatan Pengembangan Indra	85%	100%
7	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjangkaran Kesehatan untuk Peserta didik kelas VII dan X	50%	88,9%
8	Angka Kematian Jema'ah Haji < 2 / 1000 Jema'ah Haji	< 2	2,5

Sumber : Laporan Bina Yankes Prov. Sumsel

Dari tabel indikator kinerja diatas terlihat bahwa untuk indikator jumlah kabupaten/kabupaten yang telah melaksanakan program kesehatan olahraga dan jumlah Puskesmas yang telah dilatih program kesehatan olahraga, capaiannya kinerja pada tahun 2016 sebesar 100 PKM belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 110 Puskesmas. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015, terjadi penurunan yaitu pada tahun 2015 berjumlah 110 Puskesmas. Belum Tercapainya kinerja indikator ini karena tidak semua Puskesmas memahami program kesehatan olahraga, hal ini berarti Puskesmas tidak diorientasikan terhadap Kesehatan olahraga

Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X pada tahun 2016 sudah melebihi target yang diinginkan dari 88,9% dari target 50%. Tercapainya penjangkaran kesehatan dikarenakan Akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS dan Penjangkaran kesehatan telah masuk menjadi salah satu SPM Bidang Kesehatan.

Angka Kematian Jema'ah haji < 2 / 1000 pada tahun 2016 sebesar 2,5 / 1000 melebihi dari target < 2 / 1000 jema'ah. Penyebab tingginya angka kematian jema'ah haji Tahun 2016 adalah :

- Permenkes 15 tahun 2016 tentang Istithaah (kemampuan untuk berangkat haji) belum sepenuhnya menjadi acuan dan dasar dalam menentukan kelayakan jemaah untuk berangkat haji.
- Kurangnya pembinaan jemaah calon haji dalam masa tunggu untuk tetap memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan.
- Banyaknya jemaah haji yang usia lanjut
- Tidak adanya pendamping pada jemaah yang risiko tinggi (pendamping dari keluarga jemaah haji).
- 4 penyakit yang terbanyak diderita para jema'ah, yaitu hipertensi (35%), Myalgia (17%), Headache (10%) dan Acute Nasopharyngitis (9%)

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian Jema'ah Haji adalah;

- Menjadikan Permenkes 15 tahun 2016 sepenuhnya sebagai dasar acuan dalam dasar dalam menentukan kelayakan jemaah untuk berangkat haji sejak pemeriksaan di kab/kota.
- Meningkatkan pembinaan jemaah calon haji sejak dari pendaftaran awal untuk tetap memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan.

Persentase Kab/ Kota yang telah melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja pada tahun 2016 telah mencapai target yang diinginkan sebesar 80%. Tercapainya indikator ini dikarenakan telah diterapkan pelayanan kesehatan kerja di puskesmas dengan memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja kepada masyarakat pekerja di wilayah kerja puskesmas dengan tujuan meningkatkan kemampuan pekerja untuk menolong dirinya sendiri sehingga terjadi peningkatan status kesehatan dan akhirnya peningkatan produktivitas kerja.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini meliputi 15 (Lima belas) kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana, dengan anggaran sebesar Rp. 102.480.000,00, dengan realisasi anggarannya selama tahun 2016 mencapai Rp. 87.570.000,00 (85,45%), dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pengungsi dari korban bencana di Provinsi Sumsel dan 3 kejadian bencana.
- b. Pemilihan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan, dengan anggaran sebesar Rp. 200.634.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 189.715.500,00 (94,56%), dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan 51 sekolah yang mengikuti lomba sekolah sehat tingkat Provinsi.
- c. Fasilitasi Tim Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), dengan anggaran sebesar Rp. 51.780.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 29.698.700,00 (57,36%), dan realisasi fisiknya mencapai 80%. Sasaran dari kegiatan ini adalah %. Kegiatan yang telah dilaksanakan ada 8 orang yang menjadi Tim SPGDT yang difasilitasi

- d. Penyediaan Ruang Laktasi di Tempat Kerja, dengan anggaran sebesar Rp. 51.721.316,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 50.500.000,00 (97,64%), dan realisasi fisiknya 100%. Sasaran kegiatan ini Tersedianya Ruang Laktasi bagi Ibu menyusui dan ada 2 tempat Ruang Laktasi yaitu RSK Paru dan RSK Mata.
- e. Fasilitasi Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sumatera Selatan, dengan anggaran sebesar Rp. 497.642.000,00 dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 477.338.800,00 (95,92%), dan realisasi fisiknya 100%. Sasaran dari kegiatan ini tersedianya 5 orang anggota BPRS di Provinsi Sumatera Selatan.
- f. Pembinaan teknis monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan olahraga di Kab/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 76.388.000,00 dengan realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 74.760.000,00 (97,87%), dengan realisasi fisiknya 100%. Sasaran dari kegiatan ini Tersedianya 14 Kab / Kota yang mendapat fasilitas teknis tentang kesehatan olahraga.
- g. Sosialisasi Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA) Propinsi Sumsel, dengan anggaran sebesar Rp. 87.880.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 65.450.000,00, (74,48%) dengan realisasi fisiknya 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah 80 orang telah mengikuti Sosialisasi Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba.
- h. Pertemuan Evaluasi Donor Darah Aman, dengan anggaran sebesar Rp. 75.600.000,00 dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 68.925.000,00 (91,17%), dan realisasi fisiknya 100%. Sasaran kegiatan ini adalah 70 orang telah mengikuti Pertemuan Evaluasi Pelayanan Darah Aman.
- i. Pertemuan DOTS TB dan MDR/XDR di RS, dengan anggaran sebesar Rp. 68.600.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 67.505.000,00 (98,40%), dengan realisasi fisiknya 100%. Sasaran kegiatan ini adalah 80 orang telah mengikuti Pertemuan DOTS TB dan MDR/XDR di RS.
- j. Pembinaan dan Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB), dengan anggaran sebesar Rp. 179.940.000,00 dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 99.060.000,00 (55,05%), dan realisasi fisiknya 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan 12 Rumah Sakit yang mengikuti Lomba RSSIB.
- k. Pembinaan dan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas di Kab / Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 102.458.500,00 dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 66.114.174,00 (64,53%), dan realisasi fisiknya 100%. Sasaran kegiatan ini adalah 17 Kab / Kota Dinas Kesehatan telah dibina tentang Akreditasi Puskesmas.

- l. Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi , dengan anggaran sebesar Rp.171.850.000,00 dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 95.020.000,00 (55,29%), dan realisasi fisiknya 100%. Sasaran kegiatan ini adalah 9 orang telah terpilih menjadi tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Sumsel.
- m. Deteksi Dini Gangguan Pendengaran dan Ketulian pada masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 55.720.000,00 dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp.50.150.000,00 (90%), dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran kegiatan ini adalah 6 Kab/ Kota Dinas Kesehatan yang telah dibina tentang Deteksi Dini Gangguan Pendengaran dan Ketulian di masyarakat.
- n. Fasilitasi Rumah Singgah UPTD BKOKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dengan anggaran sebesar Rp. 607.500.000,00 dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 342.367.425,00 (56,36%), dan realisasi fisiknya mencapai 60%. Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya 1 rumah singgah untuk keluarga pasien.
- o. Operasional Kegiatan Jantung Sehat, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 57.003.012,00 (38%), dan realisasi fisiknya mencapai 50%. Sasaran kegiatan ini adalah 38 orang mengikuti Jambore Nasional Jantung Sehat.

7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Total anggaran pada program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 728.551.400,00, dengan realisasi anggaran pada tahun 2016 mencapai Rp. 536.820.000,00 (73,68%), dengan realisasi fisiknya telah mencapai 89,13%. Sasaran program ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap kesehatan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesadaran, kemandirian dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan.

Bentuk-bentuk kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyebarluasan Informasi Pola Hidup Sehat, dengan anggaran sebesar Rp. 222.000.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 152.150.000,00 (68,54%), dan realisasi fisiknya juga mencapai 100%. Sasaran dalam kegiatan ini adalah kampanye kesehatan Pola Hidup Sehat melalui 3 media massa pada 17 Kab/ Kota.
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian desa/ kelurahan siaga aktif dan PHBS, dengan anggaran sebesar Rp. 326.551.400,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 284.900.000,00 (87,25%), dan realisasi fisiknya mencapai 100%.

Sasaran dalam kegiatan ini adalah 17 Kab/Kota telah mengikuti Lomba desa ber-PHBS dan Posyandu.

Pemberdayaan Pramuka Saka Bakti, dengan anggaran sebesar Rp.180.000.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 99.770.000,00 (55,43%), dan realisasi fisiknya 56%. Sasaran dalam kegiatan ini adalah 100 orang Pramuka Saka Bakti Husada yang dibina tentang Prilaku Hidup Sehat.

Terkait dengan sasaran program ini, indikator kinerja yang menjadi ukuran serta target kinerja tahun 2016 yang digunakan adalah :

❖ Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri : 76%

Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri pencapaiannya pada tahun 2016 sebesar 18,87%, berarti jauh dari target yang ditetapkan sebesar 76%. Pencapaian ini menurun dari tahun kemarin sebesar 20,51%. Rendahnya capaian Persentase Desa Siaga Aktif Purnama & mandiri adalah ;

- ✚ Upaya Promosi Kesehatan masih dianggap sebagai tugas sector kesehatan semata sehingga advokasi dan koordinasi secara berkesinambungan perlu terus dilakukan bersama dengan lintas program / sectoral, pemerintah daerah, dunia usaha, swasta serta organisasi kemasyarakatan;
- ✚ Forum masyarakat desa/ kelurahan belum berjalan secara teratur;
- ✚ Mobilisasi kader kesehatan sangat tinggi;
- ✚ UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) aktif yang ada di desa rata – rata hanya Posyandu (Provinsi : Posyandu Berprestasi hanya 57,42%);
- ✚ Persentase 10% dana desa untuk bidang kesehatan belum ada;
- ✚ Belum terealisasinya peraturan di desa / kelurahan;
- ✚ Capaian rumah tangga ber PHBS masih rendah (Provinsi : 66,52%);
- ✚ Keterbatasan dukungan anggaran / pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten / Kota
- ✚ Mindset Provider kesehatan masih terfokus pada aspek kuratif dibanding dengan Preventif dan Promotif

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat berupa penanggulangan gizi buruk, pemantauan gizi dan peningkatan kemampuan petugas gizi serta pengadaan makanan tambahan dan vitamin bagi penderita gizi buruk dan kurang pada ibu hamil, bayi dan balita. Sasaran dari pelaksanaan program adalah teratasinya masalah gizi utama di masyarakat, yaitu gizi kurang dan gizi buruk terutama pada kelompok rentan. Sampai dengan bulan Desember 2016 total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program ini mencapai Rp. 2.392.276.600,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 845.606.765,00 (35,35%) serta dengan realisasi fisiknya telah mencapai 100,00%.

Dalam rangka penanganan masalah-masalah gizi tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 adalah mencakup :

- a. Penyediaan Bahan Tambahan Makanan dan Vitamin untuk Penanggulangan Kurang Gizi, dengan anggaran sebesar Rp. 2.168.436.600,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 649.298.765,00 (29,94%), dan realisasi fisiknya juga telah mencapai 100,00%. Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pengadaan susu untuk balita gizi kurang sebanyak 26.279 kotak, pengadaan makanan padat gizi (biskuit) untuk ibu hamil Kurang Gizi sebanyak 80.194 bungkus, pengadaan makanan padat (biscuit) untuk balita gizi kurang sebanyak 78.986 bungkus dan pengadaan taburia untuk baduta sebanyak 146.625 sachet.
- b. Pembinaan dan Penilaian Program Gizi, dengan anggaran sebesar Rp.223.840.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp.196.308.000,00 (87,70%), dan realisasi fisiknya juga telah mencapai 100,00%. Sasaran dalam kegiatan ini adalah 17 orang petugas gizi mengikuti Lomba Petugas Gizi Teladan Tingkat Provinsi.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat berupa penanggulangan gizi buruk, pemantauan gizi dan peningkatan kemampuan petugas gizi. Sasaran dari pelaksanaan program adalah teratasinya masalah gizi utama di masyarakat, terutama pada kelompok rentan, seperti kelompok bayi, balita dan ibu hamil serta menyusui.

Sasaran operasional program gizi sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 2014 -2018 memfokuskan pada 4 (tujuh) sasaran keluaran yang merupakan indikator program/outcome yang ingin dicapai. Ketujuh indikator kinerja tersebut dan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Persentase balita gizi buruk : < 1
2. Persentase balita gizi kurang : 11%
3. Persentase Stunting pada anak balita : 32%
4. Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif : 75%

Dari indikator kinerja tersebut diatas, capaian yang diperoleh selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan yang cukup berarti. Berdasarkan hasil survey Pemantauan Status Gizi (PSG), prevalensi gizi buruk pada balita tahun 2010 adalah sebesar 1,36%. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 1%, maka hasil kinerja selama ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut. Untuk tahun 2011, kegiatan survey pemantauan status gizi ini tidak dilakukan karena hanya dilakukan dalam kurun waktu dua tahun sekali sehingga data riil capaian prevalensi gizi buruk pada balita untuk tahun 2013 masih menggunakan data yang ada pada tahun 2010, yaitu sebesar 1,36%. Berdasarkan pelacakan kasus gizi buruk yang dilakukan dari penapisan gizi buruk

kurang pada penimbangan bulanan di posyandu di 17 kabupaten/kota, selama kurun waktu tahun 2016 sebesar 1,9 %, lebih rendah dibanding tahun 2015 sebesar 2,1%. Permasalahan gizi, khususnya gizi buruk sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk berbagai faktor yang berada di luar kesehatan, seperti faktor sosial ekonomi.

Sementara untuk prevalensi gizi kurang pada balita, capaian pada tahun 2016 adalah sebesar 9,3% sudah berada jauh dari target yang ditetapkan, yaitu kurang dari 11%. Sama seperti persentase gizi buruk pada balita, maka angka balita gizi kurang juga diperoleh melalui kegiatan survey Pemantauan Status Gizi yang dilaksanakan pada tahun 2010. Angka capaian pada tahun 2015 juga masih menggunakan data capaian pada tahun 2010, yaitu sebesar 8,23%. Namun bila dilihat dari laporan kegiatan penimbangan bulanan posyandu di 17 kabupaten/kota selama tahun 2016, ditemukan prevalensi balita gizi kurang sebesar 9,3 %, dan untuk Stunting pada anak balita sebesar 19.3% berarti di bawah dari target sebesar 32%. Kewaspadaan dini terhadap kejadian gizi kurang pada balita tetap dibutuhkan karena kondisi gizi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal di luar kesehatan.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan sektor terkait lainnya untuk terus meningkatkan status gizi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Perhatian juga diberikan terhadap kasus-kasus gizi buruk yang terjadi, dimana setiap tahunnya Dinas Kesehatan Provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin untuk Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin untuk balita gizi buruk, ibu hamil dengan KEK, terutama untuk keluarga miskin. Selain itu peningkatan status gizi masyarakat ini juga dilakukan melalui upaya peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap gizi yang baik dan pemberdayaan masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan gizi yang baik dan seimbang secara mandiri. Berbagai upaya promosi kesehatan juga terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan juga mendapatkan bantuan melalui pelaksanaan Proyek *NICE (Nutrition Improvement trough Community Empowerment)*. Pendekatan dalam pelaksanaan Proyek NICE ini adalah pemberdayaan masyarakat di bidang gizi yang pada akhirnya untuk meningkatkan status gizi masyarakat serta peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dengan gizi yang baik dan seimbang.

Pada tahun 2016, kasus gizi buruk yang terhimpun berdasarkan laporan surveilans gizi buruk dari kabupaten/kota berjumlah 90 kasus, mengalami penurunan dari tahun 2015 yang berjumlah 162 kasus. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 (203 kasus) jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan juga mengalami penurunan . Hal ini antara lain disebabkan sebagian besar petugas gizi puskesmas telah dilatih surveilans gizi dan standar pertumbuhan / antropometri yang baru sehingga petugas gizi di Puskesmas memiliki pengetahuan baru tentang standar penetapan gizi buruk, dan dengan semakin aktifnya penemuan kasus baru gizi buruk oleh petugas gizi Puskesmas menyebabkan penjarangan kasus gizi buruk lebih banyak ditemukan. Dengan semakin banyaknya penemuan kasus gizi buruk di Puskesmas menandakan bahwa pelacakan kasus gizi buruk di tingkat Puskesmas semakin aktif dilakukan oleh petugas gizi, sehingga langkah-langkah penanggulangan seperti pemberian makanan tambahan dan perawatan lebih cepat dilaksanakan dengan demikian dapat mengurangi dampak dari gizi buruk itu sendiri. Disisi

lain diharapkan dengan berbagai program yang dilaksanakan, dan semakin meningkatnya perekonomian masyarakat kasus gizi buruk dapat terus ditekan.

Pemberian ASI oleh ibu pada bayi sedini mungkin setelah melahirkan dapat menghindarkan bayi dari penyakit infeksi dan alergi. Pemberian ASI tanpa makanan dan minuman lain dianjurkan minimal 6 bulan, hal ini yang disebut sebagai pemberian ASI secara eksklusif. Pemberian ASI dapat diteruskan sampai bayi berusia 2 tahun.

Cakupan pemberian ASI Eksklusif menurut laporan ASI Eksklusif di Dinkes Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 baru mencapai 59,38%. Hasil capaian ini masih jauh dibawah target yang ditetapkan dalam Renstra Dinkes Prov. Sumsel sebesar 75,0%. Tetapi jika dibandingkan dengan hasil capaian dalam dua tahun terakhir, maka capaian pada tahun 2016 ini mengalami penurunan. Capaian pada tahun 2015 sebesar 61% dan hasil capaian pada tahun 2014 sebesar 63,05%, sehingga belum mencapai target RPJMN sebesar 75,0%. Rendahnya cakupan pemberian ASI Eksklusif dapat disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat bahkan petugas kesehatan tentang manfaat dan pentingnya pemberian ASI Eksklusif kepada bayi usia 0-6 bulan, adanya promosi yang intensif susu formula, pemantauan sulit dilakukan, pencatatan dan pelaporan yang kurang tepat, masih kurangnya tenaga konselor ASI di lapangan, RS, Klinik Bersalin belum sayang bayi, belum adanya sanksi tegas bagi RS/Klinik Bersalin/Bidan Praktek Swasta yang belum sayang bayi, dan masih banyak RS yang belum melakukan rawat gabung antara ibu dan bayinya, serta masih rendahnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

Kegiatan program gizi yang dilaksanakan salah satunya adalah surveilans gizi. Kabupaten/kota dikatakan sudah melaksanakan surveilans gizi yaitu bila telah melaksanakan pelacakan kelainan gizi (misalnya gizi buruk) dan pendampingan kasus gizi buruk, juga secara rutin jika mengirimkan laporan gizi berupa laporan penimbangan, pendataan kasus gizi, ASI Eksklusif dan lain-lain. Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan pelacakan kasus gizi buruk dapat disebut sebagai kegiatan Sistem kewaspadaan Dini. Dari 17 Kab/Kota sudah melaksanakan kegiatan surveilans gizi hanya saja laporan yang dikirimkan belum tepat waktu. Target tahun 2016 sudah mencapai target 100%.

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Total anggaran pada program Pengembangan Lingkungan Sehat adalah Rp.304.660.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 290.811.847,00 (95,45%), dengan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran program ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui peningkatan kualitas lingkungan masyarakat, perbaikan sarana air minum dan sanitasi masyarakat sesuai dengan standar yang berlaku. Perbaikan kondisi lingkungan masyarakat juga akan berpengaruh terhadap penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, karena kondisi lingkungan merupakan salah satu determinan utama terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Bentuk-bentuk kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dengan anggaran sebesar Rp. 120.680.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp.118.774.000,00 (98,42%), dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%. Sasaran dalam kegiatan ini adalah 17 Kab/ Kota telah dibina tentang Program Climate Change, Penyehatan Air Bersih dan Klinik Sanitasi.
- b. Peningkatan mutu kesehatan lingkungan, dengan anggaran sebesar Rp.93.580.000,00 dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 84.221.150,00 (90%), dengan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dalam kegiatan ini adalah 17 Kab/ Kota yang telah dibina Program PPSP dan E- Monev HSP.
- c. Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan anggaran sebesar Rp. 90.400.000,00 dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 87.816.697,00 (97,14%), dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dalam kegiatan ini adalah 17 Kab/Kota yang telah dibina dalam Program Kab/ Kota Sehat dan Pengelolaan Limba Medis.

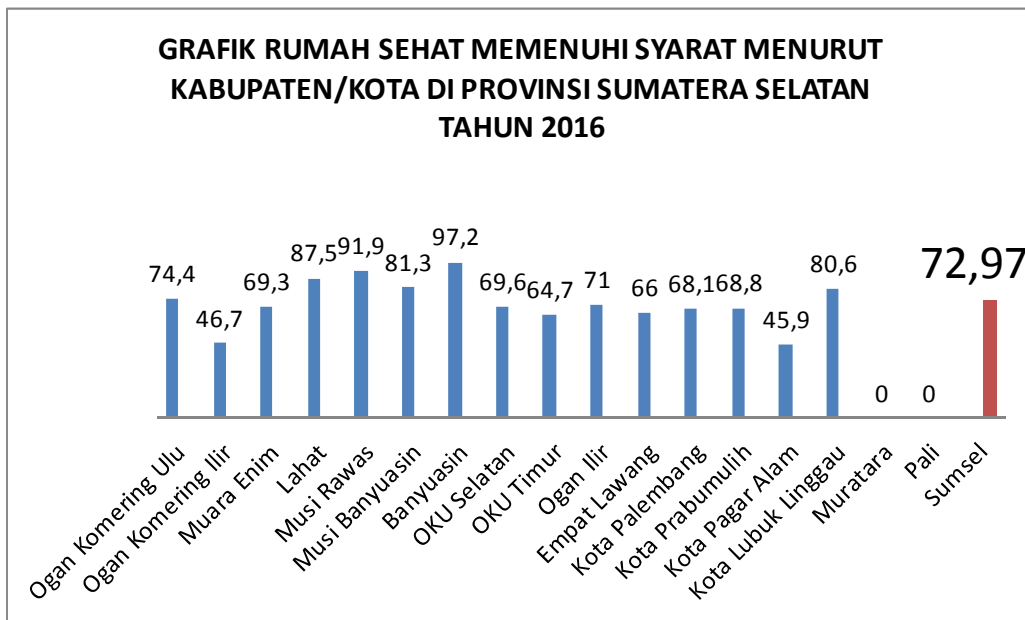
Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program penyehatan lingkungan dan target yang ditetapkan untuk tahun 2016, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 – 2018 adalah :

Tabel 3. Indikator Program Penyehatan Lingkungan

NO	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2016
1	Persentase Rumah Sehat	%	73,9
2	Persentase Tempat Tempat Umum Sehat	%	73
3	Persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih	%	73,6
4	Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	%	53
5	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KKS (Kab/Kota Sehat)	%	30

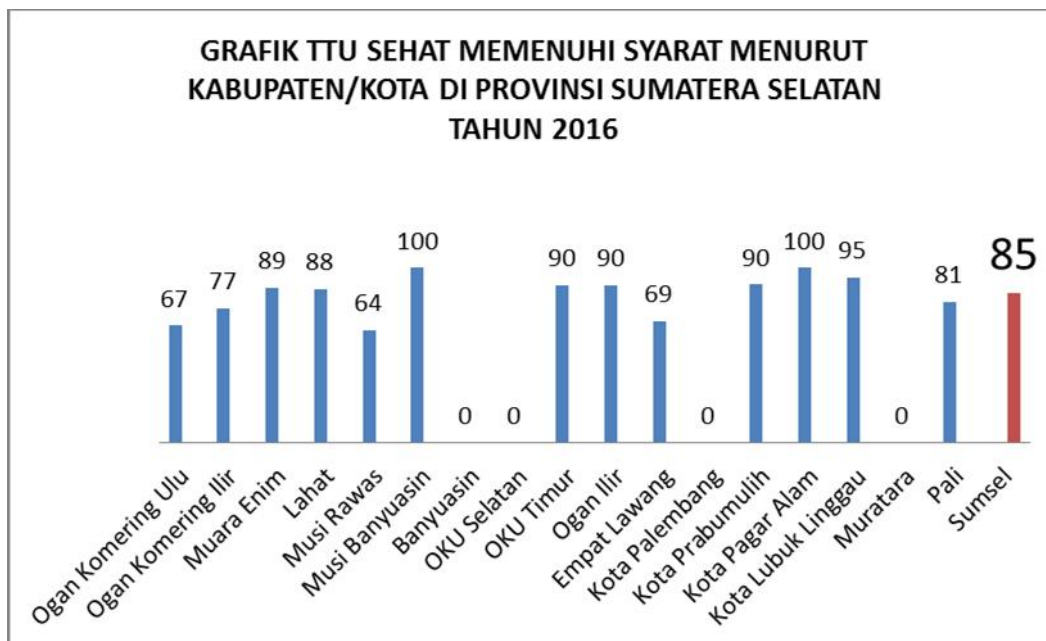
Sumber : Laporan Bina PMK Prov Sumsel

1. Persentase Rumah Sehat



Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa cakupan rumah sehat yaitu sebesar 72,97%. Cakupan tertinggi di Kabupaten Banyuasin dengan Persentase 97,2% dan cakupan terendah di Kota Pagar Alam dengan persentasi 45,9% , untuk Kabupaten Muratara dan Pali untuk data rumah sehat masih belum terdata

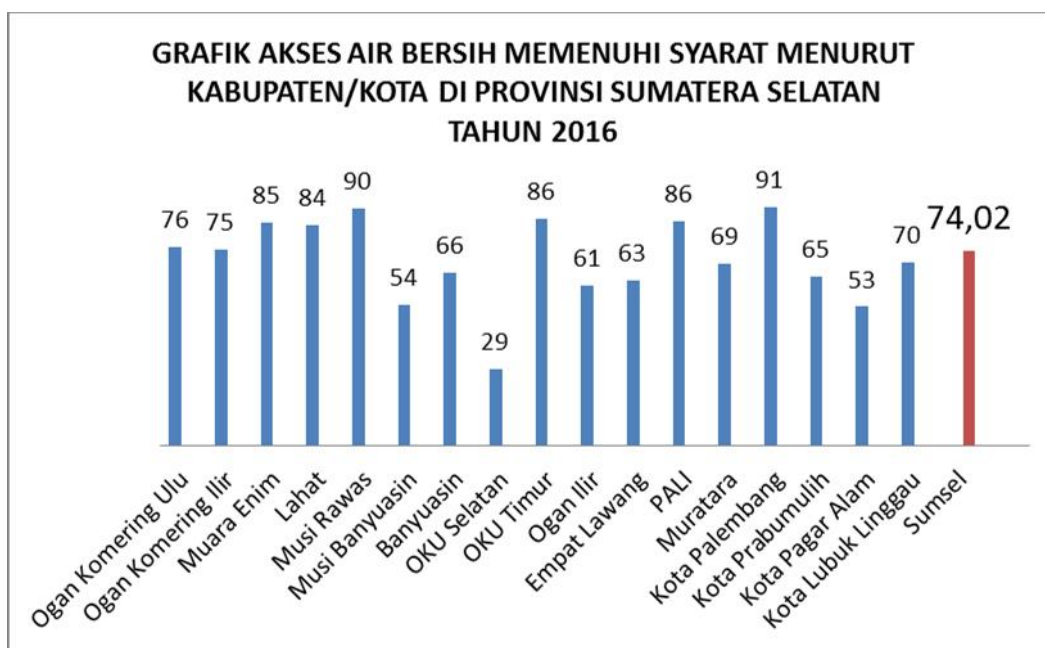
2. Persentase Tempat – Tempat Umum Sehat



Dari tabel diatas terlihat bahwa cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan menurut Kab./Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 yaitu 85 % dengan rincian sebagai berikut :

- Persentase Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan tertinggi terdapat pada Kab. Muba dan Kota Pagar Alam 100%
- Sedangkan Persentase Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan terendah terdapat pada Kabupaten Musi Rawas sebesar 64%

3. *Persentase Keluarga yang memiliki Akses terhadap Air Bersih*



Berdasarkan tabel di atas rata-rata cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 yaitu sebesar 74,02%. Dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan akses tertinggi Kota Palembang dengan 91 %. Sedangkan akses terendah Kabupaten OKU Selatan 29%.

Peningkatan tersebut disamping karena adanya program Pamsimas di Provinsi Sumatera Selatan juga karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akses terhadap sarana air bersih. Dengan kata lain peningkatan tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat akan penggunaan sarana air bersih baik yang dibangun secara mandiri maupun oleh pemerintah.

Disamping itu peran tenaga kesehatan yang memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Disadari juga bahwa penyakit yang timbul melalui media air ini cukup banyak. Untuk itu perlu terus disosialisasikan tentang pentingnya arti penggunaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan baik dari segi sarana maupun kualitas air yang digunakan.

4. Persentase Desa yang Melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

**Tabel 4. Desa Yang telah Melaksanakan STBM
Tahun 2016**

No	Kabupaten	Jumlah Desa
1	Muara Enim	176
2	OKU Timur	144
3	Lahat	183
4	Ogan Ilir	129
5	Banyu Asin	104
6	Musi Banyu Asin	102
7	Lubuk Linggau	22
8	OKUS	112
9	OKI	135
10	Musi Rawas	87
11	OKU	32
12	Musi Rawas Utara	23
13	Empat Lawang	49
14	Pagar Alam	35
15	Palembang	1
16	PALI	26
17	Prabumulih	6
	Total	1366

Dari tabel di atas Desa yang melaksanakan Program STBM sampai tahun 2016 sebanyak 17 Kab/Kota yang sudah melaksanakan STBM. Dengan Jumlah Desa 1366 Desa dari 3189 Desa dan Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah Desa melaksanakan yang STBM pada tahun 2016 sebesar 42,83%. Jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2016 sebesar 53% maka persentase capaian indikator kinerja Persentase Desa yang Melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) belum mencapai target sampai akhir renstra 2016.

5. Persentase Kab / Kota yang Melaksanakan KKS (Kabupaten / Kota Sehat)

Persentase Kabupaten / Kota yang Melaksanakan KKS (Kabupaten/ Kota Sehat) pada tahun 2016 sebesar 29,41%. Jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2016 sebesar 30% maka persentase capaian tahun 2016 untuk indikator kinerja Persentase Kab / Kota yang Melaksanakan KKS (Kabupaten/Kota Sehat) sudah mendekati target sampai akhir renstra 2016. Kabupaten yang telah melaksanakan Program Kab / Kota Sehat di Sumatera Selatan ada 5 Kabupaten / Kota yaitu ;

1. Kab. Ogan Ilir
2. Kota Palembang
3. Kota Lubuk Linggau
4. Kota Pagar Alam
5. Kota Prabumulih

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Total anggaran pada program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular adalah Rp. 1.983.711.500,00, dengan realisasi anggaran pada tahun 2016 mencapai Rp.1.553.718.100,00 (78,32%), dengan realisasi fisiknya mencapai 91,92%. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 9 jenis kegiatan. Sasaran program ini adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat berbagai penyakit menular dan tidak menular seperti DBD, Malaria, HIV/AIDS, TB, hipertensi, jantung dan lain sebagainya serta mencegah terjadinya penularan penyakit, terutama melalui imunisasi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan cepat dan tepat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk, dengan anggaran sebesar Rp. 381.675.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp.295.665.000,00 (77,47%), dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%. Capaian kegiatan yang dihasilkan adalah berupa penyemprotan/fogging nyamuk sebanyak 104 fokus.
- b. Peningkatan Imunisasi, dengan anggaran sebesar Rp. 273.183.300,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 201.915.600,00,(73,91%), dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%. Sasaran kegiatan ini adalah 17 Kab/ Kota yang telah dibina dalam Program Imunisasi dan mengikuti lomba Juru Imunisasi Teladan.
- c. Pengadaan Program Imunisasi, dengan anggaran sebesar Rp. 188.183.200,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 171.101.300,00, (90,92%) dengan realisasi fisiknya telah mencapai 100%. Sasaran kegiatan ini adalah ADS untuk Kab/ Kota sebesar 123.060 pcs.
- d. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (PPBB), dengan anggaran sebesar Rp. 268.740.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp.249.862.050,00,(92,98%) dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%. Sasaran kegiatan ini adalah 4 Jenis penyakit bersumber binatang yang diawasi dan dikendalikan.
- e. Pengendalian penyakit menular langsung, dengan anggaran sebesar Rp.271.990.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp.254.529.750,00, (93,58%) dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%. Sasaran kegiatan ini adalah 5 Jenis penyakit menular langsung yang diawasi dan dikendalikan.
- f. Pembinaan Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular, dengan anggaran sebesar Rp. 208.164.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp.185.271.200,00, (89%) dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%. Sasaran kegiatan ini adalah Pembinaan Surveilans PD3I, pelaksanaan EWARS dan Surveilans Terpadu pada 17 Kab/ Kota
- g. Pengendalian Penyakit Tidak Menular, dengan anggaran sebesar Rp. 141.211.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 130.773.200,00, (92,61%) dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%. Sasaran kegiatan ini adalah 200 orang pemeriksaan PTM dan 300 orang pemeriksaan IVA dan pembinaan di 17 Kab/ Kota.

- h. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji, dengan anggaran sebesar Rp. 150.565.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 64.600.000,00, (42,91%) dan realisasi fisiknya telah mencapai 60%. Sasaran kegiatan ini adalah 17 Kab/ Kota yang telah dibina Program Kesehatan Haji.

Beberapa indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ini adalah sebagai berikut :

➤ ***Angka Keberhasilan Pengobatan Penyakit TB BTA (+)***

Angka keberhasilan pengobatan penderita TB BTA (+) pada tahun 2015 mencapai 75,91% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 85%. Jika dibandingkan dengan target kinerja diatas, maka hasil capaian pada tahun 2015 belum mencapai dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian program pada tahun 2014 sebesar 85,35%, maka capaian pada tahun 2015 ini mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Keberhasilan pengobatan tahun 2016 tidak dapat dilihat karena keberhasilan Pengobatan ini dapat dilihat setelah penderita melakukan pengobatan selama 6 - 9 bulan makanya pengobatan baru sampai tahun 2015. Upaya yang dilakukan dalam Keberhasilan Pengobatan Penderita TB BTA (+) yaitu :

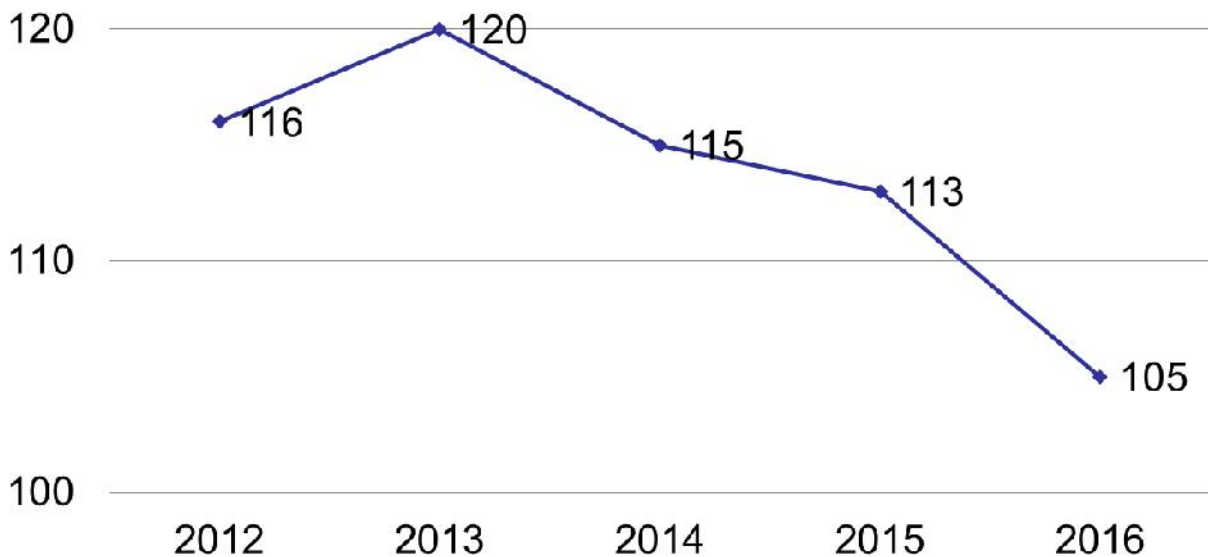
1. Penguatan kepemimpinan program TB di kabupaten/kota
 - a. Regulasi eliminasi TB, peningkatan pembiayaan
 - b. Koordinasi dan sinergi program
2. Peningkatan akses layanan TB yang bermutu “TOSS-TB”
 - ❖ Peningkatan jejaring layanan TB melalui PPM (public-private mix)
 - ❖ Penemuan aktif berbasis masyarakat
 - ❖ Inovasi diagnosis TB
3. Pengendalian Faktor risiko TB
 - ✓ Promosi lingkungan dan hidup sehat
 - ✓ Pencegahan infeksi dan profilaksis
4. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengendalian TB
5. Penguatan manajemen program
6. Penelitian dan pengembangan inovasi program
7. Pengendalian biaya katastrofik layanan TB
8. Koordinasi dengan lintas Sektor spt : Dinsos, PUCK (perbaikan perumahan), PMD (pemberdayaan masy. Desa)

❖ ***Case Notification Rate Kasus TB per 100.000 penduduk***

Case Notification Rate per 100.000 penduduk pada tahun 2016 ditargetkan 132 orang dan terealisasi 105 orang. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2016, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2016. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, case notification Rate per 100.000 penduduk mengalami fluktuatif dari 116 orang tahun 2012 kemudian menjadi 120 orang di tahun 2013, pada

tahun 2014 turun 115 orang pada tahun 2015 turun lagi menjadi 113 orang dan pada tahun 2016 dan turun lagi menjadi 105 orang seperti terlihat pada grafik berikut ;

**Grafik Case Notification Rate Program TB
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 - 2016**



Program Pengendalian Penyakit TB Paru di Sumatera Selatan telah melaksanakan dengan strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*), TB Paru merupakan masalah kesehatan, Berdasarkan hasil survey prevalensi TB di Indonesia tahun 2004 menunjukkan bahwa angka prevalensi TB BTA positif secara regional untuk wilayah Sumatera adalah 160 per 100.000 penduduk

Sampai dengan tahun 2014 program penanggulangan TB dengan strategi DOTS di Sumatera Selatan menjangkau 100% Puskesmas, sementara untuk Rumah Sakit baru mencapai 75%. Kesenjangan antara target dan capaian indikator dalam TB paru antara lain :

- Belum semua RS di Sumsel melaksanakan strategi DOTS (50%)
- Sedikit sekali didapat data Pasien yang berobat ke (DPS)Dokter Praktik Swasta (1<%)
- Rutan/Lapas. Klinik dan Workplace Belum berjalan maksimal
- Angka Default (pasien mangkir) banyak terdapat di RS
- Sistem Jejaring Eksternal di beberapa Kab/Kota belum maksimal
- Turn Over Petugas Tinggi (terutama dokter)

Program Pengendalian Penyakit TB Paru di Sumatera Selatan telah melaksanakan dengan strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*), TB Paru merupakan masalah kesehatan, Berdasarkan hasil survey prevalensi TB di Indonesia tahun 2004 menunjukkan bahwa angka prevalensi TB BTA positif secara regional untuk wilayah Sumatera adalah 160 per 100.000 penduduk

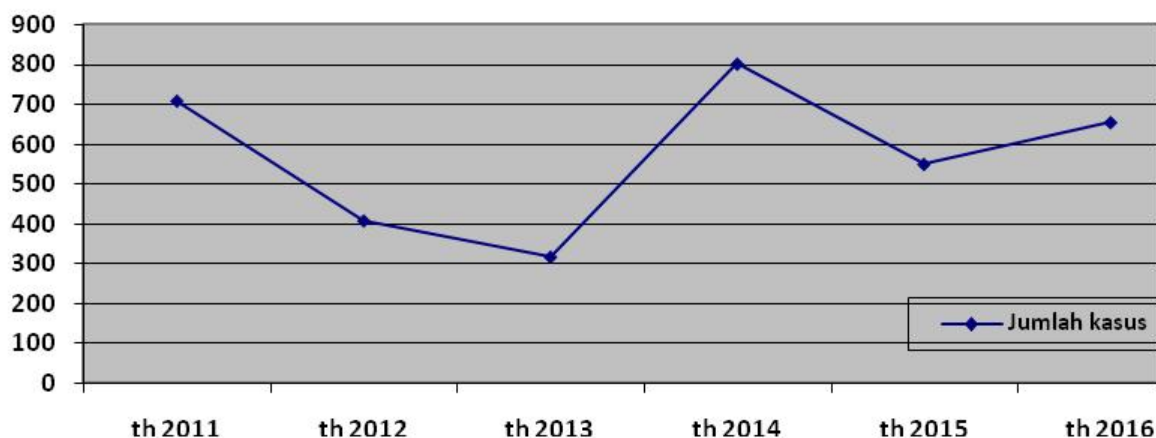
Sampai dengan tahun 2016 program penanggulangan TB dengan strategi DOTS di Sumatera Selatan menjangkau 100% Puskesmas, sementara untuk Rumah Sakit baru mencapai 75%. Kesenjangan antara target dan capaian indikator dalam TB paru antara lain :

- Belum semua RS di Sumsel melaksanakan strategi DOTS (50%)
- Sedikit sekali didapat data Pasien yang berobat ke (DPS)Dokter Praktik Swasta (1<%)
- Rutan/Lapas. Klinik dan Workplace Belum berjalan maksimal
- Angka Default (pasien mangkir) banyak terdapat di RS
- Sistem Jejaring Eksternal di beberapa Kab/Kota belum maksimal
- Turn Over Petugas Tinggi (terutama dokter)

➤ **Angka Kasus “ Discarded” Campak pada tiap100.000 penduduk**

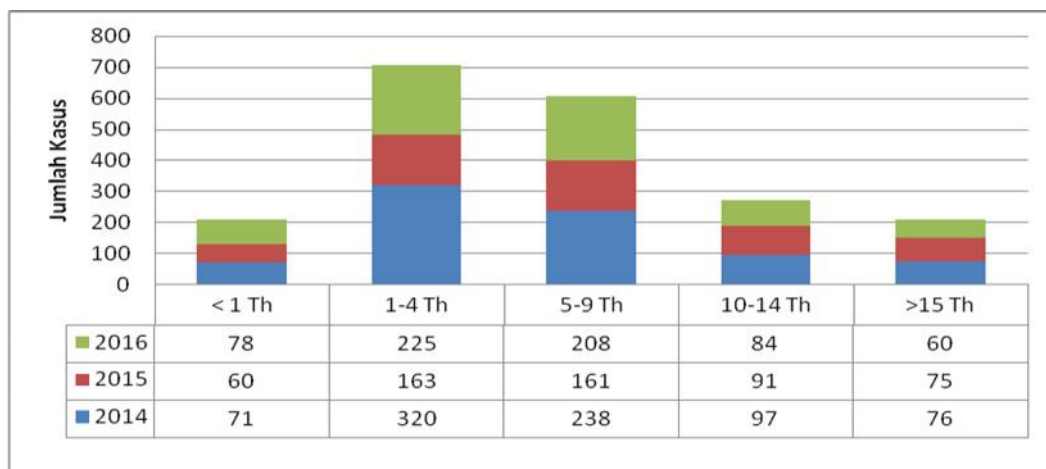
Pelaksanaan surveilans campak meliputi pengumpulan data rutin dan KLB menggunakan formulir C1 yang terintegrasi dengan kasus AFP dan Tetanus Neonatorum. Selain itu kasus campak mulai bulan Juli 2009 dilaksanakan Cases Based Méasles Surveillance (CBMS) dengan konfirmasi laboratorium sebanyak 20% total kasus rutin dalam 1 tahun. Namun karena negara kita akan menuju Eliminasi Campak pada tahun 2020, maka mulai tahun 2013 persentase klinis Campak yang dilakukan konfirmasi laboratorium menjadi sebesar 50%.

Grafik : Penemuan Kasus Campak Rutin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 - 2016



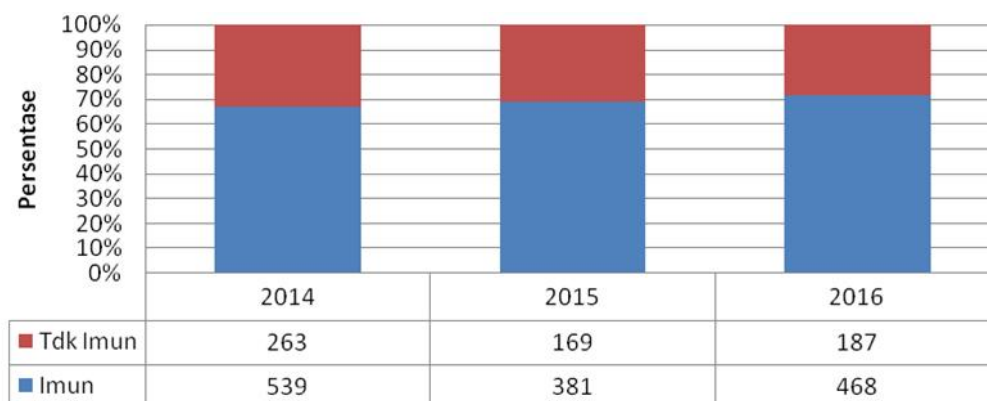
Dari grafik diatas terlihat terjadi fluktuasi kasus klinis campak setiap tahunnya, dimana pada tahun 2014 klinis campak dilaporkan meningkat menjadi 802 kasus dengan kelengkapan laporan campak (C-1) hanya sebesar 77%. Sementara pada tahun 2015 kasus yang dilaporkan sebanyak 550 kasus dengan kelengkapan laporan (C-1) hanya sebesar 71,5%. Sementara untuk tahun 2016 tercatat sebanyak 655 kasus dengan kelengkapan C-1 hanya sebesar 57%. Dengan asumsi jumlah kasus klinis campak tahun 2016 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dimasyarakat.

Grafik : Penemuan Kasus Campak Rutin Menurut Kelompok Umur
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2016



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kasus terbanyak setiap tahunnya terjadi pada kelompok umur > 5 tahun yaitu sebesar > 51% jika dibandingkan pada kelompok umur < 4 tahun (49%). Pencapaian tahun 2016 mengalami peningkatan persentase dengan komposisi yang sama yaitu kelompok umur > 5 tahun menjadi 54% dan kelompok umur < 4 tahun yaitu 46%.

Grafik : Status Imunisasi Penderita Klinis Campak Pada Semua Kelompok Umur
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2016

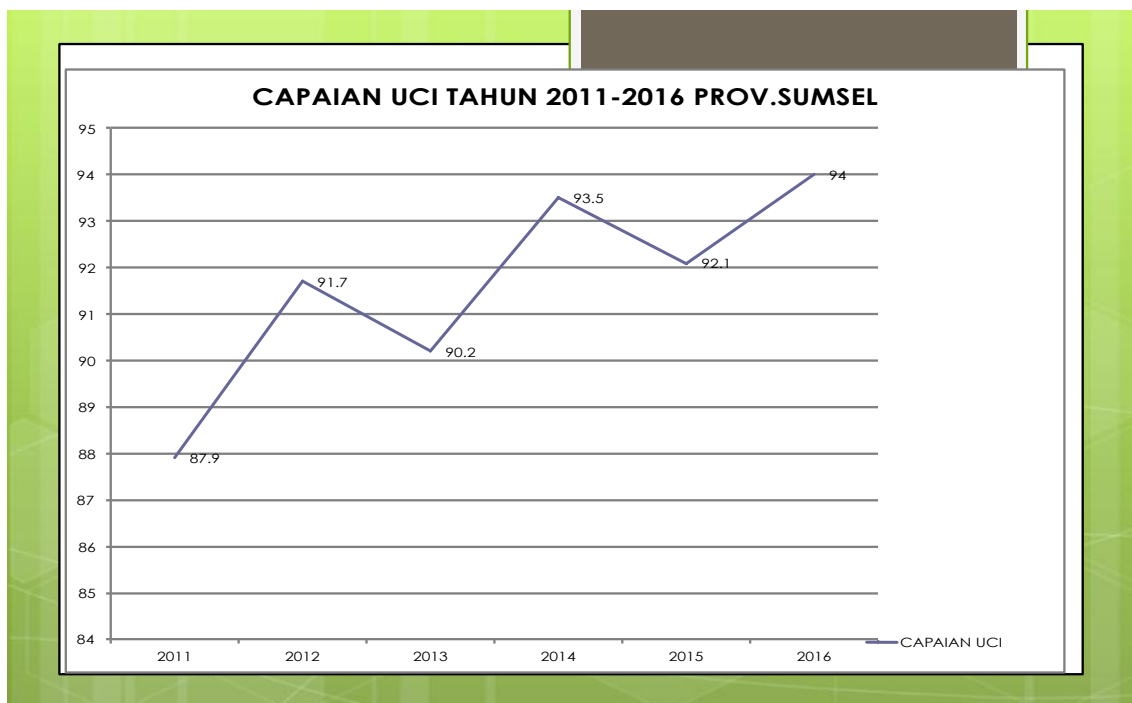


Dari grafik diatas terlihat bahwa > 50% kasus sudah pernah mendapat Imunisasi Campak, sisanya belum mendapat imunisasi . Dari > 50% yang sudah mendapat imunisasi, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak – anak tetap terkena campak diantaranya rantai dingin vaksin, dan faktor evikasi vaksin (Evikasi vaksin campak 85%) dimana vaksin yang disuntikkan tidak 100% memberikan kekebalan pada anak, Dan terlihat bahwa kelompok kasus yang belum mendapat imunisasi semakin kecil setiap tahunnya. Dan harus tetap ditingkatkan kualitas pemberian imunisasi baik cakupan maupun rantai dingin vaksin.

➤ *Persentase Desa yang mencapai UCI*

Persentase desa yang mencapai UCI pada tahun 2016 ditargetkan 95 persen dan terealisasi 94 persen . Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2016, maka hasil capaian sudah mendekati target akhir Renstra 2016. Pencapaian tahun 2016 meningkat dari tahun 2015 sebesar 92,1%, hal ini dapat dilihat dari grafik sebagai berikut :

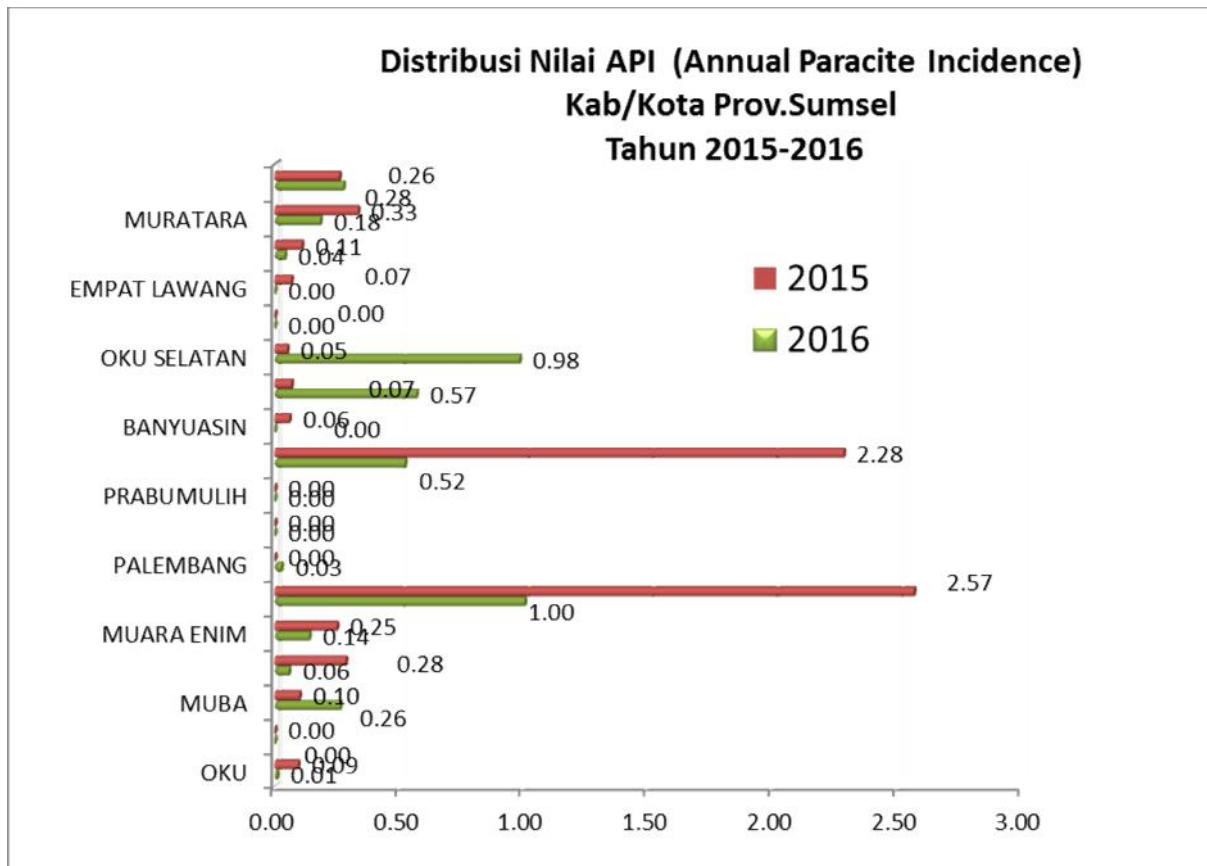
Grafik Capaian UCI di Sumatera Selatan Tahun 2011 s/d 2016

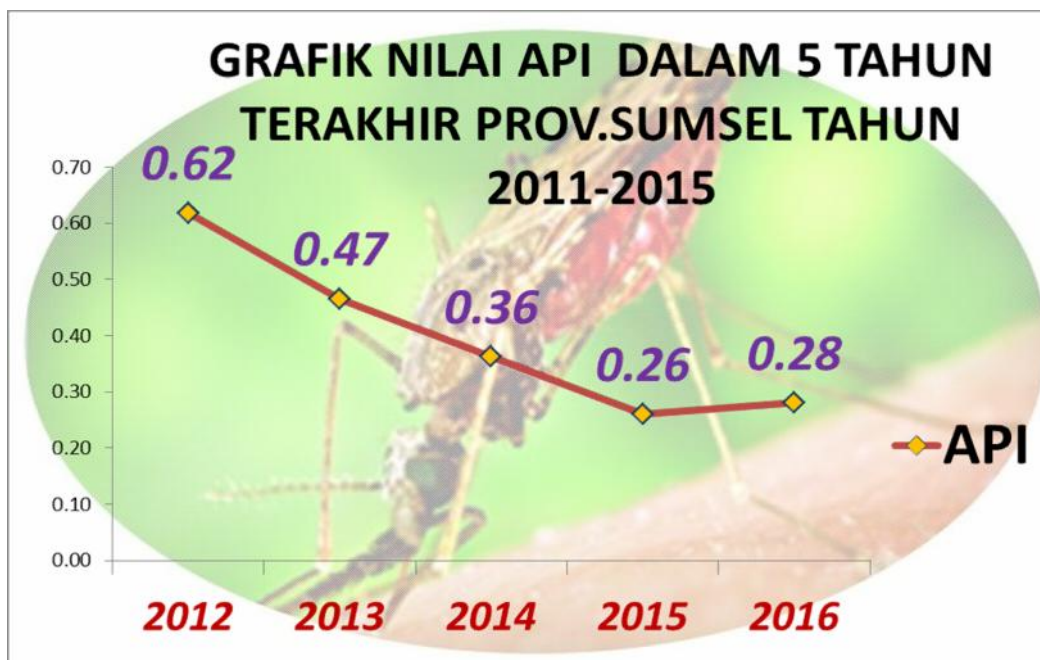
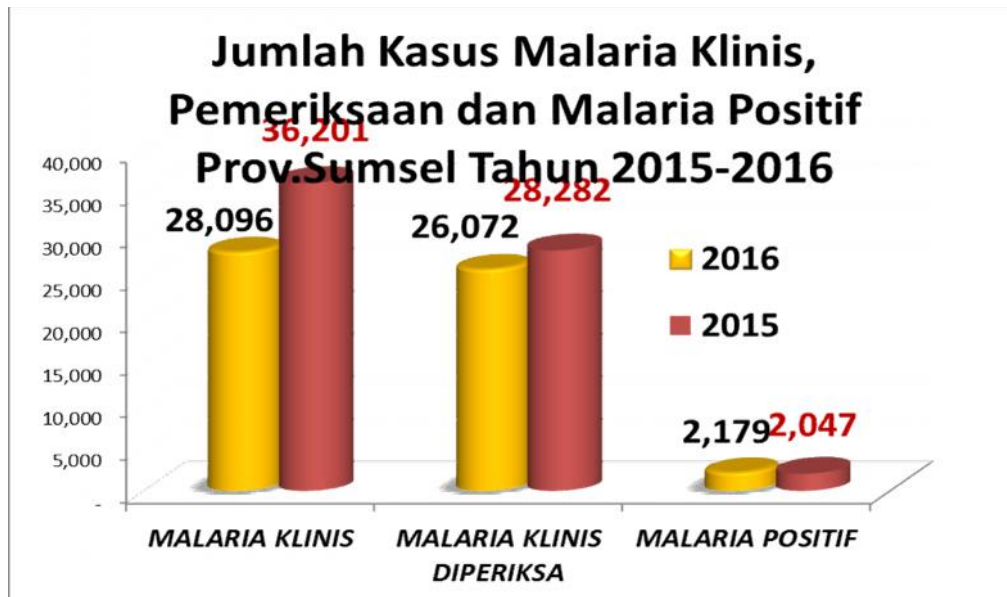


Dari grafik di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun cakupan UCI Desa di kabupaten/kota terjadi fluktuasi dan tidak stabil. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut, apalagi sebagian petugas imunisasi kabupaten/kota dan puskesmas baru dimutasi dan belum dilatih mengenai program imunisasi, baik teknis program maupun cold chain. Selain itu juga sarana dan prasarana sebagian sudah disediakan dari provinsi.

➤ **Annual Parasit Incidence (API)**

Jumlah kasus klinis malaria Prov. Sumsel tahun 2016 sebanyak 28.096 kasus dengan AMI 5,3 per 1000 penduduk. Dari kasus klinis tersebut yang dikonfirmasi laboratorium sebanyak 26.072 kasus dan jumlah positif menderita malaria sebanyak 2.179 kasus dengan nilai API sebesar 0,28 per 1000 penduduk, nilai ini termasuk dalam kategori kasus malaria rendah (*low case incidence*). Kasus positif malaria yang tertinggi terdapat di Kabupaten Lahat dengan API 1,0 per 1000 penduduk, kemudian Kota OKUS dengan API 0,98 per 1000 penduduk dan Kabupaten OKUT dengan nilai API 0,57 per 1000 penduduk.

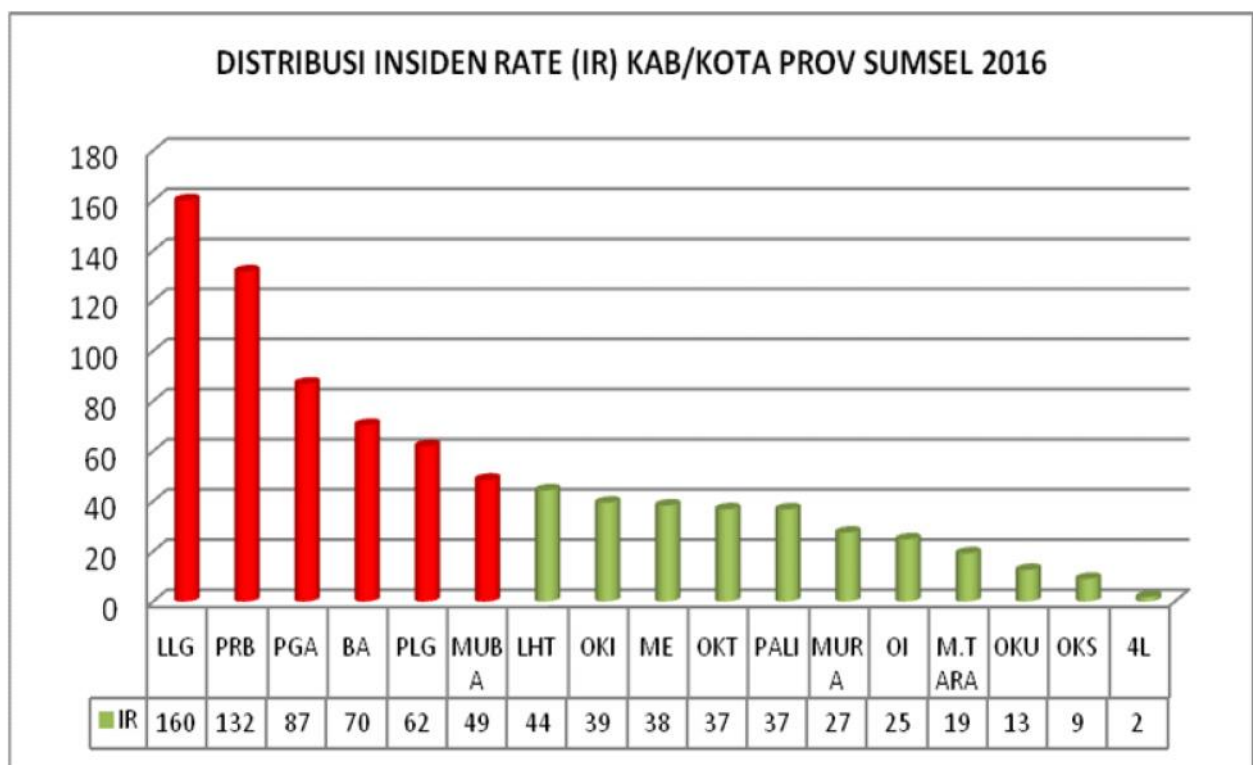




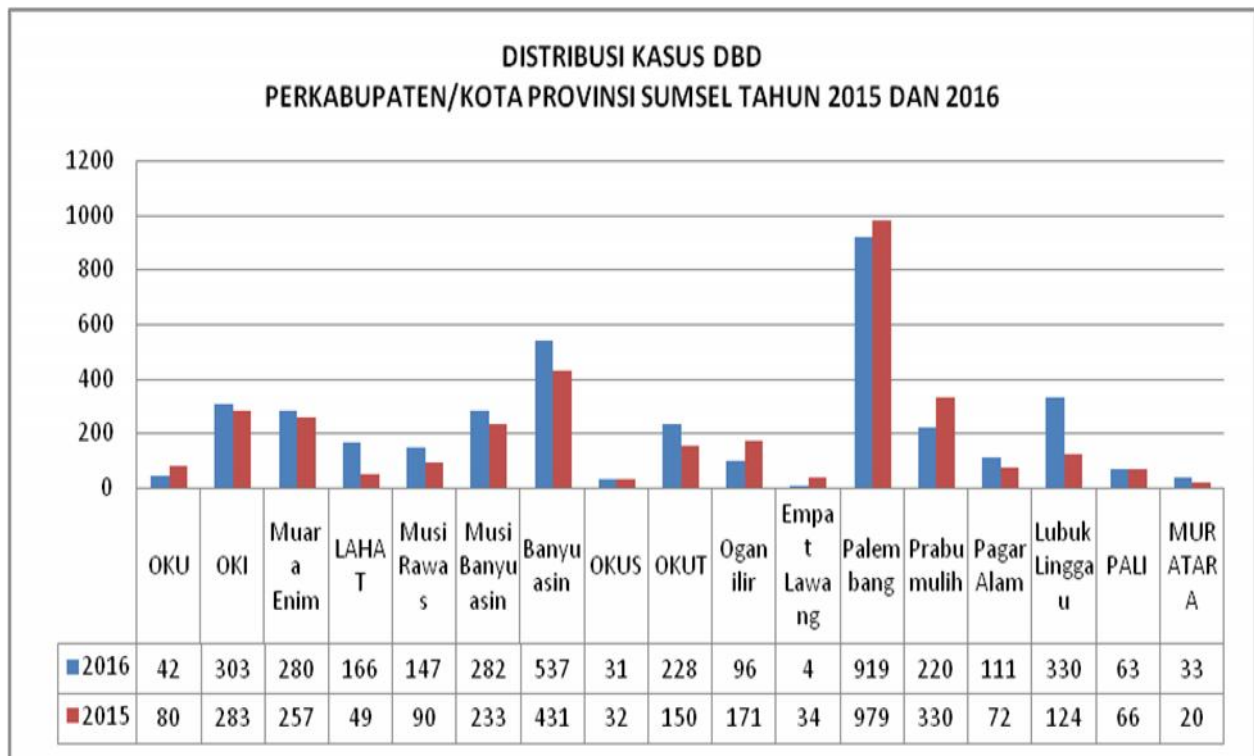
Pada tahun 2016, nilai API menurun menjadi 0,28 per 1000 penduduk. Namun hal ini belum bisa memastikan sepenuhnya endemisitas rendah, dikarenakan masih banyak diagnosa klinis tanpa pemeriksaan mikroskopis malaria. Diharapkan pada tahun 2016, penemuan kasus malaria positif dapat dilakukan dengan maksimal sehingga didapatkan data yang lebih valid.

➤ **Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk**

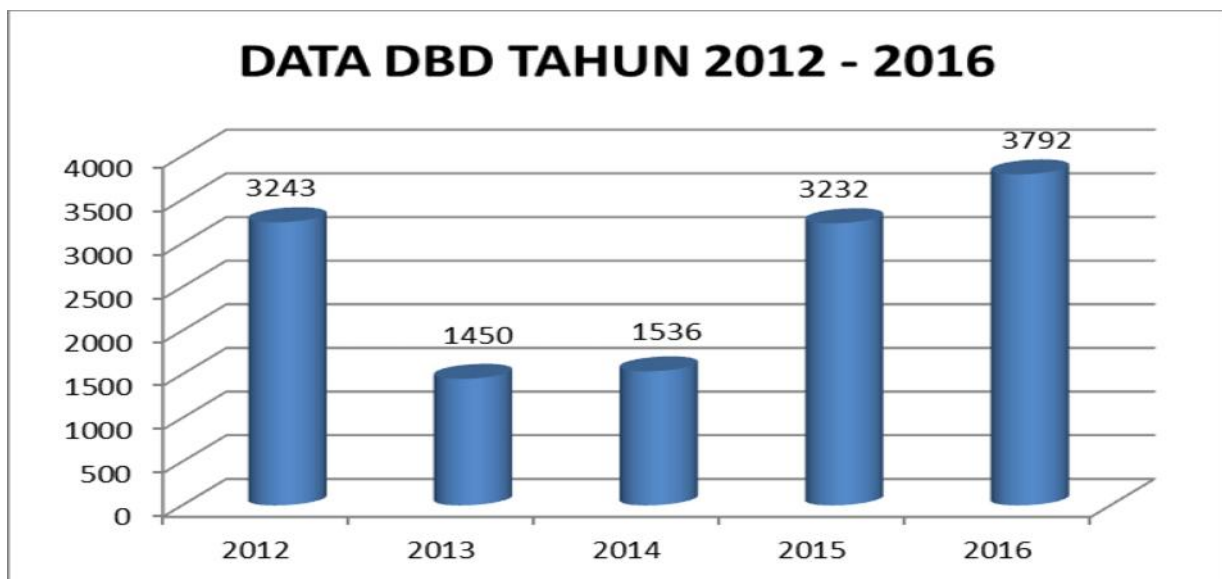
Situasi Demam Berdarah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 terjadi peningkatan kasus dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2016 jumlah kasus mencapai 3.792 kasus (IR sebesar 65/100.000 penduduk) dengan jumlah kematian sebanyak 0 kematian (CFR 0,55%). Sementara pada tahun 2015 jumlah penderita DBD sebanyak 3.232 kasus (IR 49/100.000 penduduk) dengan kematian sebanyak 0 orang (CFR 0.43%).



Dari Grafik diatas terlihat distribusi Rate (IR) yang tertinggi pada Kota Lubuk Linggau sebesar 160 / 100.000 penduduk, Prabumulih 132 / 100.000 penduduk. Sementara yang terendah pada Kabupaten Empat Lawang 2/ 100.000 penduduk dan OKUS 9 / 100.000 penduduk.



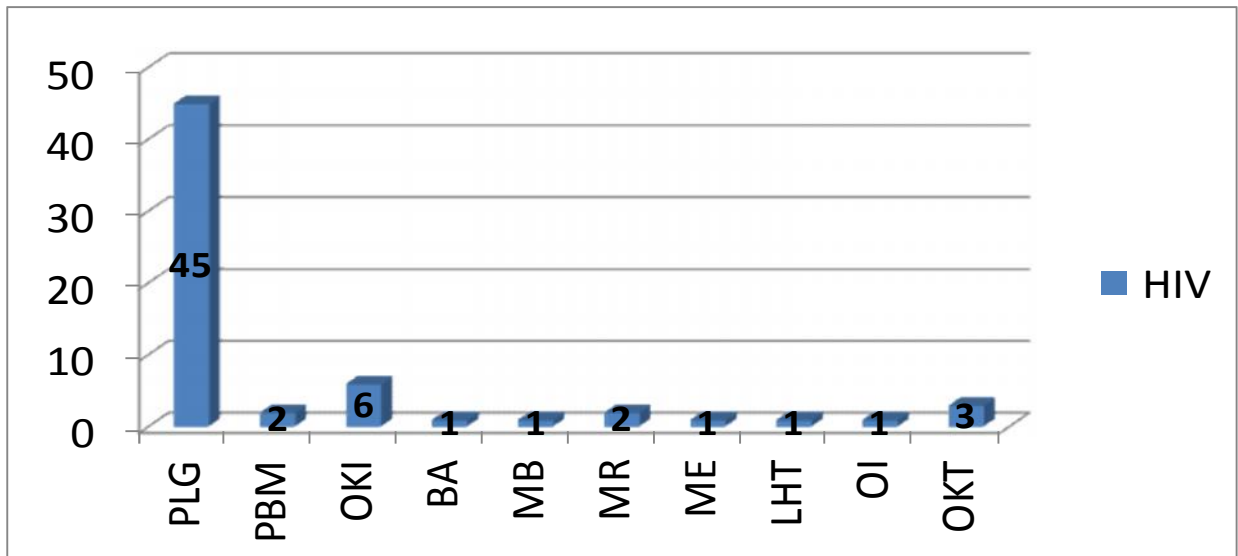
Dari grafik diatas kasus DBD sepanjang tahun 2016 terjadi pada Kota Palembang sebesar 919 kasus, Kab. Banyuasin 537 Kasus. Sementara yang terendah Kab. Empat Lawang 4 kasus. Tingginya Kasus DBD tahun 2016 karena musim penghujan.



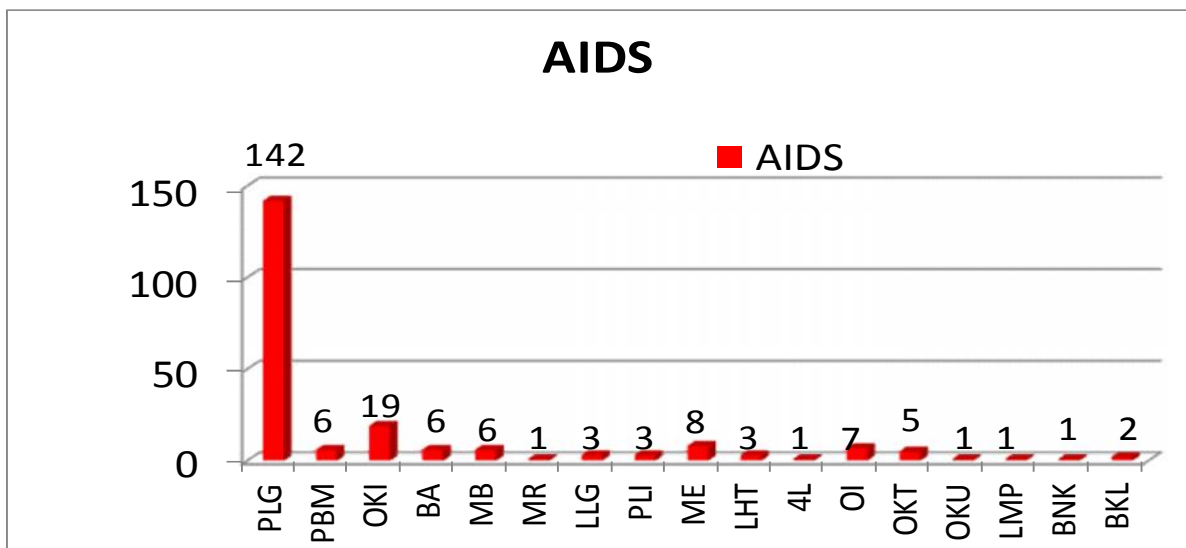
➤ **Jumlah orang umur > 15 tahun yang melakukan KTS (Konseling Testing Sukarela)**

Jumlah orang umur > 15 tahun yang melakukan KTS (Konseling pada Testing Sukarela) pencapaian pada tahun 2016 sebesar 12.289 lebih sedikit dari target sebesar 31.466. Pencapaian tahun 2016 menurun dari tahun 2015 sebesar 18.253.

**Grafik. Penyebaran Penderita HIV
Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016**



**Grafik Penyebaran Penderita AIDS
Per Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016**



➤ **Persentase Desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular**

Persentase Desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular capaiannya tahun 2016 sebesar 22,23% berarti sudah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 12%. Walaupun pencapaian Posbindu sudah melebihi dari target tapi masih kurangnya Puskesmas yang memiliki Posbindu di tempatnya. Karena tiap Puskesmas harusnya memiliki 2 Posbindu.

➤ **Persentase Kab/Kota yang memiliki Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)**

Persentase Kab/Kota yang memiliki Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) capaiannya tahun 2016 sebesar 70,59%, berarti capaian tahun 2016 sudah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 40%. Walaupun sudah melebihi dari target Tapi masih ada beberapa daerah mengalami kendala terutama dalam hal penerbitan peraturan daerah sehingga perlu diusulkan pertemuan advokasi untuk kawasan tanpa rokok untuk kab/ kota dan sosialisasi dalam berbagai kesempatan mengenai Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perkembangan Perda KTR di kabupaten/kota sebagai berikut :

NO	KAB/KOTA	PERKEMBANGAN KTR
1	OKU	PERDA KTR TAHUN 2015
2	OKI	PERDA KTR NO.6 TAHUN 2015
3	MUARAENIM	BELUM ADA PROSES
4	PRABUMULIH	EDARAN DAN PERWAKO SUDAH ADA, PERDA DALAM PROSES
5	OKU SELATAN	EDARAN BUPATI
6	OKU TIMUR	BELUM ADA PROSES
7	PAGARALAM	BELUM ADA PROSES
8	LAHAT	EDARAN BUPATI
9	EMPAT LAWANG	PERDA KTR TAHUN 2015
10	OGAN ILIR	PERDA KTR NO. 3 TAHUN 2015
11	PALEMBANG	PERDA KTR NO. 7 TAHUN 2009
12	BANYUASIN	PERBUP ADA, PERDA KTR DALAM PROSES
13	MUSI BANYUASIN	PERBUP ADA
14	LUBUK LINGGAU	PERDA KTR
15	MUSI RAWAS	PERBUP ADA
16	PALI	EDARAN BUPATI
17	MURATARA	BELUM ADA PROSES
18	PROVINSI	PERDA KTR NO. 7 TAHUN 2015

Dari tabel diatas Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) hampir sebagian sudah punya PERDA, hanya tinggal 4 Kabupaten yang belum punya PERDA yaitu :

1. Kab. Ogan Komering Ulu Timur
2. Kota Pagar Alam
3. Kab. Muratara
4. Kab. Muara Enim

➤ **Persentase Perempuan Usia 30 – 50 Tahun dideteksi dini Ca. Serviks dan Payudara**

Persentase Perempuan Usia 30 – 50 Tahun dideteksi dini Ca. Serviks dan Payudara capaiannya tahun 2016 sebesar 1,47%, berarti pencapaiannya tahun 2016 belum mencapai target sebesar 2%. Penyebab rendahnya pencapaian indikator adalah :

1. Cakupan Kegiatan deteksi dini IVA dan CBE untuk kanker Cervix dan Kanker Payudara masih rendah
2. Belum semua puskesmas terlatih IVA dan CBE melakukan kegiatan rutin pemeriksaan IVA dan CBE sedangkan Target cakupan perempuan usia 30-50 tahun yang diperiksa IVA dan CBE sangat tinggi
3. Masih banyak perempuan yang takut memeriksa dirinya seperti SADARI, pap smear dan Vaksin HPV

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut adalah;

1. Pengusulan anggaran untuk deteksi dini IVA dan CBE
2. Tindak lanjut dengan mengadakan pelatihan IVA dan CBE untuk meningkatkan pemeriksaan IVA dan CBE agar menaikkan cakupan pemeriksaan
3. Melakukan Perluasan informasi tentang penyakit kanker serviks dan payudara berupa leaflet dan pamlet
4. Melakukan sosialisasi melalui seminar / kampanye tentang pengendalian kanker serviks dan payudara

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Total anggaran pada program Standarisasi Pelayanan Kesehatan adalah Rp.100.000.000,00, dengan realisasi anggaran pada tahun 2016 mencapai Rp. 95.960.000,00 (95,96%), dengan realisasi fisiknya mencapai 100,00%. Anggaran tersebut digunakan untuk Pembinaan dan Fasilitasi akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan & pesertanya ada 21 Rumah Sakit pada 17 Kab/ Kota. Sasaran dari program dan kegiatan ini adalah meningkatnya manajemen dan mobilisasi sumber daya disemua jenjang administrasi serta terlaksananya pembinaan dan penilaian akreditasi rumah sakit .

Indikator kinerja yang terkait dalam program ini selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Persentase rumah sakit yang terakreditasi versi 2012 dengan target kinerja pada tahun 2016 sebesar 15% dan hasil capaian kinerja sebesar 28%. Hasil capaian diatas telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2016. Sampai saat ini untuk Provinsi Sumatera Selatan terdapat 63 rumah sakit, dimana 31 diantaranya merupakan rumah sakit milik pemerintah.
- b. Persentase Rumah Sakit Mampu PONEK
Persentase Rumah Sakit Mampu PONEK capaian tahun 2016 sebesar 75% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Hal ini berarti capaian kinerja indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2016. Walaupun sudah melebihi dari target yang ditetapkan, masih ada kendala yaitu :
 1. SDM yang sdh dilatih sebagai tim PONEK berpindah tugas
 2. Masih banyak RSUD yang belum mempunyai sarana dan prasarana PONEK sesuai standar.
 3. Dokter Spesialis anak dan obgyn belum merata di seluruh RSUD
 4. Kurangnya komitmen RSUD unt mendukung program PONEK

Upaya yg sudah dilakukan :

- a. Melakukan pelatihan ulang TIM Ponek RSUD di kab/kota
- b. Mengadvokasi ke RSUD kab/kota unt melengkapi sarana dan prasarana PONEK sesuai standar
- c. Mengadvokasi ke RSUD kab/kota untuk menyekolahkan dokter umum menjadi dokter spesialis anak dan obgyn, serta memberikan insentif bagi dokter spesialis anak dan obgyn agar mau bertugas diwilayahnya.

12. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pada tahun anggaran 2016, program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata mendapatkan anggaran yang cukup besar, yaitu mencapai Rp. 51.229.110.384,00 untuk 4 (empat) kegiatan yang ada di dalamnya. Dari keempat kegiatan yang ada pada program diatas, semuanya sudah selesai pengerjaannya sampai 100% realisasi fisiknya. Sementara untuk realisasi keuangannya telah mencapai Rp. 42.363.970.750,00 (82,70%). Sasaran dari program ini adalah terjaminnya ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan bagi penduduk dan meningkatnya upaya kesehatan dan cakupan program kesehatan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terkait dengan program ini adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan Rumah Sakit, dengan anggaran sebesar Rp. 47.655.018.300,00, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 40.457.949.400,00 (84,90%), dan realisasi fisiknya juga telah mencapai 100%. Capaian kegiatan yang dihasilkan adalah berupa Pembangunan Gedung RSUD Provinsi Sumatera Selatan Tahap IV, Konsultan interior gedung RSUD Provinsi, Konsultan perencanaan RS Paru Provinsi, Konsultan Perencana Gudang Obat dan Alat Kesehatan semua itu berjumlah 1 paket.
- b. Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit, dengan anggaran sebesar Rp. 3.124.092.084,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.471.509.450,00 (47,10%), dan realisasi fisiknya juga telah mencapai 100,00%. Capaian yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya alat kesehatan rumah sakit pada 1 RS.
- c. Pengadaan Bahan – Bahan Logistik Rumah Sakit, dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 191.665.400,00 (95,83%) dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan logistic rumah sakit untuk 2 rumah sakit.
- d. Pengadaan Mobil Ambulance / mobil jenazah, dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp.242.846.500,00 (97,14%) dan realisasi fisiknya sebesar 100%. Sasaran kegiatannya adalah tersedianya mobil ambulance untuk PMI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 unit.

Indikator kinerja yang terkait dalam program ini selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Persentase Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar. Persentase RSUD yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar capaiannya tahun 2016 sebesar 62,15%, berarti capaiannya tahun 2016 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 75%.
- b. Persentase Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar. capaiannya tahun 2016 sebesar 60,70%, berarti capaian tahun 2016 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 70%.

Penyebab Puskesmas dan Rumah Sakit yang memiliki sarana dan prasarana yang sesuai standar tidak sesuai target yang diinginkan dikarenakan :

- a. Pelaporan dan update data pada ASPAK belum berjalan dengan baik dikarenakan masih kurangnya sarana pendukung (IT di Puskesmas) dan SDM di Puskesmas.
- b. Data inventaris barang di Puskesmas dan RS masih belum tertib (belum terdokumentasi dengan baik).
- c. Dana untuk pembinaan, pengawasan dan monev belum dipenuhi.
- d. Masih Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang IT.

Upaya yang dilakukan :

- a. Mendorong kab/kota untuk mendukung sarana dan prasarana di Puskesmas dan melatih SDM di Puskesmas dalam melakukan pelaporan data ASPAK.
- b. Mendorong kab/kota untuk melakukan kalibrasi alat kesehatan
- c. Mengupdate data inventaris barang di Puskesmas dan RS setiap tahun
- d. Penyediaan alokasi dana untuk pembinaan, pengawasan dan monev ke kab/kota
- e. Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang IT

13. Program Pemeliharaan Sarana dan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pada tahun anggaran 2016, program pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata mendapatkan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 untuk 1 (satu) kegiatan yang ada di dalamnya. Dari kedua kegiatan yang ada pada program diatas, semuanya sudah selesai pengerjaannya sampai 100,00% realisasi fisiknya. Sementara untuk realisasi keuangannya sampai dengan akhir tahun 2016 telah mencapai Rp. 49.349.000,00 (24,67%). Sasaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya meubeleur di rumah sakit.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini selama tahun 2016 terdiri dari dua kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Meubeleur Rumah Sakit, dengan total anggaran sebesar Rp.50.000.000,00, dengan realisasi anggarannya pada tahun 2016 mencapai Rp. 49.349.000,00 (98,70%), dan realisasi fisiknya mencapai 100,00%. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala meubeleur yang ada di Rumah Sakit sebanyak 2 rumah sakit.

14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pada tahun anggaran 2016, program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 681.200.000,00 untuk 3 (tiga) kegiatan yang ada di dalamnya. Dari kedua kegiatan yang ada pada program diatas, semuanya sudah selesai pengerjaannya sampai 95,52% realisasi fisiknya. Sementara untuk realisasi keuangannya sampai dengan akhir tahun 2016 telah mencapai Rp. 253.589.998,00 (37,23%). Sasaran dari kegiatan ini masyarakat Sumatera Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini selama tahun 2016 terdiri dari tiga (3) kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengawasan Rujukan Puskesmas untuk Program Jamsoskes Sumsel Semesta, dengan total anggaran sebesar Rp.241.200.000,00, dengan realisasi anggarannya pada tahun 2016 mencapai Rp. 97.281.998,00 (40,33%), dan realisasi fisiknya mencapai 100,00%. Sasaran kegiatan ini adalah 16 Kab/ Kota yang telah melakukan pengawasan rujukan Puskesmas untuk Program Jamsoskes Sumsel Semesta.

- b. Pertemuan Forum Komunikasi JPKM, dengan total anggaran sebesar Rp.20.000.000,00, dengan realisasi anggarannya pada tahun 2016 mencapai Rp. 12.030.000,00 (60,15%), dan realisasi fisiknya mencapai 61,00%. Sasaran kegiatan ini adalah Pertemuan forum komunikasi JPKM telah dilaksanakan sebanyak 2 kali.
- c. Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta, dengan total anggaran sebesar Rp.400.000.000,00, dengan realisasi anggarannya pada tahun 2016 mencapai Rp. 144.278.000,00 (36,07%), dan realisasi fisiknya mencapai 100,00%. Sasaran kegiatan ini 40.000 masyarakat Sumsel mendapatkan Jamsoskes.

Indikator dan target kinerja program pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin : 100%
- 2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin :100%
- 3. Persentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta : 100%.

Persentase keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai 100,0%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan adanya program berobat gratis atau Jamsoskes Sumsel Semesta, tidak ada lagi penduduk miskin yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya karena sudah dijamin oleh Pemerintah.

Sementara untuk persentase penduduk peserta JPKM juga sudah mencapai 100,0%. Hal ini disebabkan karena penduduk yang belum mempunyai jaminan atau asuransi kesehatan telah ditanggung melalui Program Jamsoskes Sumsel Semesta yang memang diperuntukkan bagi seluruh penduduk Sumatera Selatan yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan. Cakupan jaminan atau asuransi kesehatan di Sumatera Selatan telah meliputi seluruh penduduk atau telah mencapai “*Universal Coverage*”.

15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Pada tahun anggaran 2016, program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia mendapatkan anggaran sebesar Rp. 158.639.500,00 untuk 2 (dua) kegiatan yang ada di dalamnya. Dari kedua kegiatan yang ada pada program diatas, semuanya sudah selesai pengerjaannya sampai 100,00% realisasi fisiknya. Sementara untuk realisasi keuangannya sampai dengan akhir tahun 2016 telah mencapai Rp. 146.510.000,00 (92,35%). Sasaran dari kegiatan ini adalah Posyandu Lansia dan Kartu Menuju Sehat Lansia.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini selama tahun 2016 terdiri dari tiga kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Penilaian Posyandu Lansia Tingkat Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp. 108.452.000,00, dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 98.605.000,00 (90,92%) dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran kegiatannya adalah 17 Posyandu Lansia yang mengikuti Lomba .

- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Pelayanan Kesehatan Lansia, dengan anggaran sebesar Rp. 50.187.500,00, dengan realisasi anggaran mencapai Rp.47.905.000,00 (95,45%), dan realisasi fisiknya juga telah mencapai 100,00%. Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya Kartu Menuju Sehat Lansia di Kab/ Kota sebanyak 5.500 lembar.

Indikator kinerja program yang digunakan untuk menilai keberhasilan program ini adalah Jumlah Kabupaten/kota yang mengembangkan program Usila yaitu sebanyak 17 kabupaten/kota. Pada tahun 2016 sebanyak 17 Kabupaten / Kota telah mengembangkan program kesehatan Usila, ini berarti capaian indikator kinerja program ini telah mencapai 100 persen.

16. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Total anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan pada tahun 2016 adalah Rp. 834.200.000,00 dimana sampai dengan akhir tahun 2016 ini realisasi penyerapan anggaran telah mencapai Rp. 580.371.000,00 (69,57%) dengan realisasi fisiknya telah mencapai 100,00%. Sasaran dari program ini adalah memberikan penyuluhan keamanan dan kesehatan makanan pada industri Rumah Tangga. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan :

- a. Pembinaan dan pengawasan sarana dan produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 460.000.000,00 dimana sampai dengan akhir tahun 2016 ini realisasi penyerapan anggaran telah mencapai Rp. 259.351.000,00 (56,38%) dengan realisasi fisiknya telah mencapai 100,00%. Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan adalah 51 IRTP yang telah diperiksa dan dibina.
- b. Pembinaan dan pengawasan produk pangan industri pabrikan, dengan anggaran sebesar Rp. 224.200.000,00, dimana sampai akhir tahun 2016 realisasinya sebesar Rp. 198.010.000,00 (88,32%) dan realisasi fisik mencapai 100%. Sasaran dalam kegiatan ini adalah Jumlah produk dan industri rumah tangga yang diawasi sebanyak 140 produk.
- c. Pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman di restoran/hotel, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00, dimana sampai akhir tahun 2016 realisasi anggaran sebesar Rp. 123.010.000,00 (82,01%) dan realisasi fisik mencapai 100%. Sasaran dalam kegiatan ini adalah 68 Restoran / hotel yang telah dibina dan diawasi tentang keamanan kesehatan pangan

Hasil capaian dari program ini pada tahun 2016 dapat dilihat dari indikator programnya. Indikator yang terkait dengan program ini dan target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang sudah memiliki izin edar. Target indikator ini pada tahun 2016 sebesar 80% dan telah tercapai sebesar 54,79% ini berarti bahwa target indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan. Jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 76,26% terjadi penurunan . Rendahnya indikator ini adalah :

1. IRTP masih belum sepenuhnya menyadari perlunya untuk mengikuti penyuluhan dan pemeriksaan IRTP yang memenuhi syarat kesehatan.
2. Pemilik IRTP masih sulit untuk memenuhi persyaratan kesehatan IRTP karena keterbatasan modal.

Upaya yang dilakukan :

1. Melakukan pembinaan dan bimbingan ke IRTP untuk memenuhi persyaratan kesehatan
2. Menginisiasi kerjasama dengan lintas sektor dengan Dinas terkait (koperasi, dana CSR dan pihak perbankan) dalam hal pemenuhan modal.
3. Mendorong kepada IRTP agar membuat wadah perkumpulan usaha dalam rangka tukar informasi dan memajukan usaha mereka serta mempermudah akses permodalan.

TABEL 4.
INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN YANG MEMPUNYAI
IZIN EDAR (PIRT) MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN

NO.	KABUPATEN/KOTA	IRTP MEMPUNYAI IZIN EDAR 2015		IRTP MEMPUNYAI IZIN EDAR 2016	
		JML	%	JML	%
1.	OKU	188	45,19	188	45,19
2.	OGAN ILIR	82	61,25	84	61,31
3.	OKI	70	70,00	70	70,00
4.	OKU TIMUR	18	32,83	18	32,83
5.	OKU SELATAN	20	100	20	100
6.	PBM	86	63,70	120	88,88
7.	MUARA ENIM	123	35,55	198	75,86
8.	LAHAT	125	92,59	125	92,59
9.	PAGAR ALAM	79	45,40	140	100
10.	EMPAT LAWANG	63	100,00	63	100,00
11.	PALEMBANG	317	80,80	317	80,80
12.	MUSI RAWAS	33	23,40	70	51,85
13.	MUSI BANYUASIN	50	100	50	100
14.	BANYUASIN	94	37,30	94	37,30

15.	LUBUK LINGGAU	22	28,20	22	28,20
16.	PALI	10	33,33	10	33,33
17.	MURATARA	50	100	50	100
	PROVINSI	1430	76,26		54,79
	TARGET		80.00		80.00

17. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Total anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak pada tahun 2016 adalah Rp. 321.573.000,00 dimana sampai dengan akhir tahun 2016 ini realisasi atau penyerapan anggaran telah mencapai Rp. 275.511.500,00 (85,68%) dengan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari program ini meningkatnya kondisi kesehatan ibu dan anak, yang ditandai dengan semakin menurunnya angka kematian ibu dan bayi serta membaiknya capaian indikator program.

Jika dilihat dari jumlah kematian bayi, maka pada tahun 2016 ini jumlah kematian bayi sebanyak 87 kasus dan jumlah kematian ibu, maka pada tahun 2016 ini jumlah kematian ibu di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 140 kasus dari total 164.623 kelahiran hidup. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini pada tahun 2016 adalah :

- Pemilihan Bidan Teladan Tingkat Provinsi, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 adalah Rp. 89.990.000,00 dimana sampai dengan akhir tahun 2016 ini realisasi atau penyerapan anggaran telah mencapai Rp. 69.140.000,00 (76,83%) dengan realisasi fisiknya mencapai 100%. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah : 17 orang bidan yang mengikuti lomba Bidan Teladan Tingkat Provinsi.
- Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp.157.522.000,00, dimana sampai akhir tahun 2016 realisasi anggaran sebesar Rp.136.896.500,00 (86,91%) dan realisasi fisik mencapai 100%. Sasaran dalam kegiatan ini adalah Jumlah Balita yang mengikuti Lomba Balita Sehat Tingkat Provinsi Sumsel sebanyak 34 anak balita.
- Peningkatan dukungan lintas program dan lintas sector dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan anggaran sebesar Rp. 22.148.000,00, dimana sampai akhir tahun 2016 realisasi anggaran sebesar Rp. 22.000.000,00 (99,33%) dan realisasi fisik mencapai 100%. Sasaran dalam kegiatan ini adalah Pertemuan peningkatan dukungan lintas program dan lintas sector dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak sebanyak 24 orang dan dilakukan 1 kali
- Kampanye Peduli kesehatan Ibu, dengan anggaran sebesar Rp. 51.913.000,00, dimana sampai tahun 2016 realisasi anggaran sebesar Rp. 47.475.000,00 (91,45%) dan

realisasi fisik mencapai 100%. Sasaran dalam kegiatan ini adalah Kampanye peduli kesehatan ibu diikuti 240 orang peserta.

Terkait dengan program ini, indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan program dan targetnya pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

❖ Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten : 98%.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada tahun 2016 telah mencapai 87,15%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 yang telah mencapai 82,01%. Hasil kinerja pada tahun 2016 ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 98%. Rendahnya capaian target ini disebabkan karena pengawalan program P4K yang belum optimal sehingga masih terdapat persalinan pada Non Nakes (sebanyak 1000 dukun belum bermitra dengan Nakes). Upaya yang harus dilakukan terkait dengan peningkatan capaian program ini adalah dengan penempatan tenaga kesehatan, terutama bidan di tingkat desa (Bidan Desa) sehingga akses masyarakat, terutama ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan atau perlu adanya kemitraan antara bidan desa dan dukun bayi (perlu adanya pelatihan bagi para dukun bayi bagaimana pertolongan persalinan yang benar).

❖ Jumlah Kasus Kematian Ibu sebesar 140 Kasus

Pada tahun 2016 jumlah kasus kematian ibu yang dicatat dan dilaporkan sebanyak 140 kasus dari total 164.623 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2016 sebesar 138 kasus berarti target jumlah kasus kematian ibu tidak tercapai. Kasus kematian ibu tertinggi terjadi di kabupaten OKUT (14 kasus), kemudian diikuti oleh kabupaten Musi Rawas (13 kasus) dan Kabupaten OKUS timur (11 kasus). Sedangkan kasus kematian ibu terendah terjadi di Kab. Pali (2 Kasus), Pagar Alam, masing – masing 3 kasus dan Kota Prabumulih (4 kasus). Permasalahan yang sama juga disebabkan karena deteksi dini faktor resiko oleh tenaga kesehatan yang kurang cermat, penanganan persalinan yang kurang adekuat/tidak sesuai prosedur (tidak ditolong oleh tenaga yang kompeten) serta sistem rujukan yang tidak sesuai dengan prosedur jejaring manual rujukan. Selain penanganan yang tidak adekuat, jumlah kasus kematian meningkat disebabkan juga karena manajemen program yang sudah terlaksana sesuai sistem manajemen yang baik, diantaranya : Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal yang melibatkan TIM Teknis dan Tim Manajemen, sehingga seluruh kematian ibu maternal dapat terlacak serta sistem pencatatan dan pelaporan yang sudah berjalan dengan baik.

❖ Jumlah Kasus Kematian Bayi sebesar 87 Kasus

Jumlah kematian bayi yang dicatat dan dilaporkan selama tahun 2016 yaitu sebanyak 87 kasus kematian bayi. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 110 kasus, maka indikator ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Kasus kematian bayi tertinggi terjadi di kabupaten OKU (20 kasus), kemudian diikuti oleh kabupaten Musi Banyuasin (16 kasus) dan Kabupaten OKU timur (12 kasus). Sedangkan kasus kematian bayi terendah terjadi di Kab. Empat Lawang (2 Kasus), Lubuk Linggau, Muratara, Pali,

OKU Selatan dan kab. OKI (tidak ada kasus kematian Bayi). Penyebab kematian bayi di provinsi Sumatera Selatan, disebabkan oleh kurangnya nakes dalam memberikan KIE tentang pemberian makanan tambahan pada bayi, pengetahuan orang tua tentang waktu yang tepat dalam pemberian makanan tambahan.

❖ **Jumlah Kasus Kematian Balita sebesar 39 Kasus**

Jumlah kematian Balita yang dicatat dan dilaporkan selama tahun 2016 yaitu sebanyak 39 kasus. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 48 kasus, maka indikator ini sudah melebihi dari mencapai target yang ditetapkan. Kasus kematian Balita tertinggi ada pada tahun 2016 terjadi di Kota Palembang sebanyak 10 kasus kemudian OKU (8 kasus) dan Ogan Ilir dan OKUT masing – masing 6 kasus.

18. Pendidikan Kesehatan

Total anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Pendidikan Kesehatan pada tahun anggaran 2016 adalah Rp. 940.300.000,00 dimana sampai dengan akhir tahun 2016 ini realisasi atau penyerapan anggaran telah mencapai Rp. 840.650.739,00 (89,40%) dengan realisasi fisiknya mencapai 71,00%. Sasaran dari program ini adalah terlaksananya pembinaan dan akreditasi terhadap tenaga kesehatan serta terselenggaranya proses pendidikan pada Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 untuk program pendidikan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan Akademi Kesehatan Lingkungan, dengan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 940.300.000,00, dengan realisasi anggaran pada tahun 2016 telah mencapai Rp. 840.650.739,00 (89,40%), dan realisasi fisiknya mencapai 71%. Sasaran kegiatan ini adalah Jumlah mahasiswa yang Akademi Kesehatan Lingkungan yang dididik sebanyak 287 mahasiswa.

19. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Hasil pelaksanaan dari program dan kegiatan ini dapat dilihat dari pencapaian indikator untuk program tersebut. Indikator yang digunakan terkait dengan pelaksanaan program ini dan target yang ditetapkan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Kecukupan SDM di RSUD sesuai standar : 70%

Persentase kecukupan SDM di RSUD sesuai standar pencapaiannya tahun 2016 sebesar 85,71% berarti capaian tahun 2016 sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 70%. Peningkatan capaian tahun 2016 yaitu banyaknya SDM yang mengikuti pelatihan yang terampil seperti akreditasi, SP2KP dan pelatihan yang berhubungan dengan RS.

2. Persentase Kecukupan SDM di Puskesmas sesuai standar : 70%

Persentase kecukupan SDM di Puskesmas sesuai standar pencapaiannya tahun 2016 sebesar 77,77% berarti capaian tahun 2016 sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 70%.

Walaupun pencapaian sudah melebihi dari target tapi kecukupan SDM masih mengalami kendala yaitu :




1. Distribusi nakes masih belum merata di RSUD dan di Puskesmas
2. Daerah terpencil / terisolir dengan jumlah penduduk yang sedikit kurang diminati nakes
3. Beberapa tenaga strategis seperti dokter gigi dan lab maedik di Puskesmas dan dokter spesialis di RSUD masih sangat kurang.
4. Masih kurang pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap kedisiplinan pegawai khususnya nakes.

Upaya yang dilakukan :

1. Mengupdate data dan informasi yang lengkap tentang ketersediaan nakes di RSUD dan Puskesmas.
2. Pengangkatan tenaga untuk dokter gigi, lab medik untuk Puskesmas dan spesialis untuk di RSUD.
3. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah tentang kedisiplinan pegawai (memberikan reward dan punishment)
4. Mengusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk penempatan tim Nusantara Sehat di daerah terpencil dan tertinggal.

3. Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) : 50%.

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) capaiannya tahun 2016 sebesar 86,06% (42.497 yang sudah keluar dari 49.375 yang diusulkan) berarti capaian tahun 2016 sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 50%. Peningkatan capaian tersebut adalah Jumlah tenaga kesehatan yang STR lebih banyak dari usulan STR karena ;

-  Pengusulan STR banyak yang tidak melalui MTKP sehingga data usulan tidak ada di MTKP
-  Semua STR yang sudah selesai dikirim melalui MTKP
-  Banyak STR yang dicetak 2x (double cetak).

20. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar

Hasil pelaksanaan dari program dan kegiatan ini dapat dilihat dari pencapaian indikator untuk program tersebut. Indikator yang digunakan terkait dengan pelaksanaan program ini dan target yang ditetapkan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut adalah Persentase Puskesmas yang Terakreditasi : 10%.

Persentase Puskesmas yang terakreditasi pada tahun 2016 capaiannya sebesar 8,4% (27 Puskesmas yang terakreditasi dari 322 Puskesmas di Sumatera Selatan). Hal ini berarti bahwa pada 2016 indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 10%. Belum tercapainya indikator ini dikarenakan :

1. Puskesmas masih dalam tahap penyusunan dokumen dan utamanya masih dalam implementasi dokumen akreditasi puskesmas
2. Terbatasnya dana anggaran APBD untuk akreditasi puskesmas
3. Puskesmas masih kurang “*Percaya Diri*” untuk dilakukan survey.

Upaya yang dilakukan :

1. Memotivasi secara moral dan nyata terhadap puskesmas yang disiapkan untuk akreditasi agar mau dilakukan survey. Motivator tersebut antara lain adalah tim pendamping Kabupaten/ Kota, dinas kesehatan Kab/Kota maupun dinas kesehatan provinsi
2. Perlu dilakukan advokasi ke Bupati, Ketua DPRD Kab/Kota, Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab/Kota, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota mengenai pentingnya Akreditasi Puskesmas
3. Mempercepat proses penyusunan dokumen dan implementasinya dengan melibatkan penanggung jawab program terkait di Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi.

21. Penanganan Keluarga Berencana

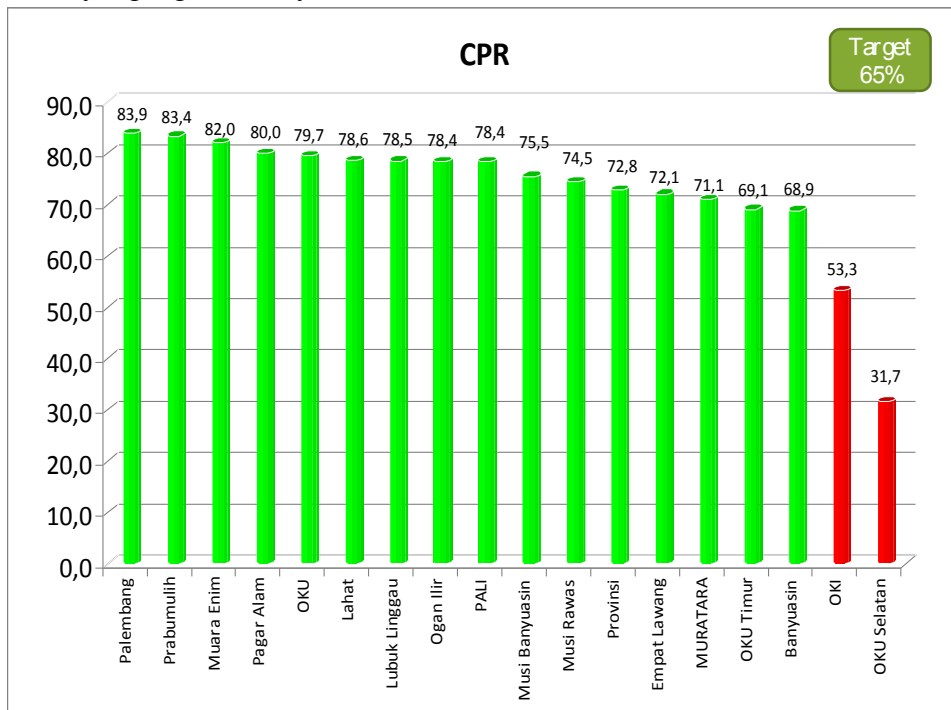
Total anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Penanganan Keluarga Berencana pada tahun anggaran 2016 adalah Rp. 116.280.000,00 dimana sampai dengan akhir tahun 2016 ini realisasi atau penyerapan anggaran telah mencapai Rp. 116.000.000,00 (99,76%) dengan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari program ini adalah Puskesmas mendapatkan pembinaan Manajemen KB.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 untuk program Penanganan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pendampingan Penanganan Keluarga Berencana, dengan anggaran sebesar Rp. 116.280.000,00, dimana sampai akhir tahun 2016 realisasi anggaran sebesar Rp. 116.000.000,00 (99,76%) dan realisasi fisik mencapai 100%. Sasaran dalam kegiatan ini adalah 17 Kab/ Kota yang mendapatkan pembinaan Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana.

Hasil pelaksanaan dari program dan kegiatan ini dapat dilihat dari pencapaian indikator untuk program tersebut. Indikator yang digunakan terkait dengan pelaksanaan program ini dan target yang ditetapkan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Persentase PUS yang memiliki Peserta KB Aktif : 65%
 2. Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi(Unmet Need KB) : 6%
 3. Total Fertility Rate (TFR) : 2,2
1. Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif, pencapaian tahun 2016 sebesar 72,8%, hal ini sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 65%. Cakupan peserta KB aktif (CPR) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 mencapai 72,8% bila dibandingkan dengan tahun 2015 (67%) mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,8%, dan sudah mencapai target RPJMD maupun target Nasional. Dalam tiga tahun terakhir CPR mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu : 62% (2014), 67% (2015), 72,8% (2016).



Pada grafik diatas terlihat ada kesenjangan yang signifikan antar kabupaten kota dalam melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana, pemahaman masyarakat akan pentingnya keluarga sehat dengan moto dua anak cukup tidak ada lagi pemahaman banyak anak banyak rezeki, kondisi ekonomi sosial masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mendorong PUS melakukan pelayanan keluarga berencana.

Cakupan peserta KB aktif tertinggi di Kota Palembang dengan capaian sebesar 83,9% diikuti oleh Kota prabumulih (83,4%) dan Kab. Muara Enim (82,0%) kemudian Kota Pagar Alam 80%, OKU 79,7%, Kab.Lahat sebesar 78,6%, dan yang paling terendah terdapat di Kabupaten OKU Selatan (31,7%) disusul oleh Kabupaten OKI (53,3%).

2. Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need KB) pencapaiannya tahun 2016 sebesar 11.8% berarti pencapaiannya melebihi dari target sebesar 6%, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang KB, kurangnya dukungan suami dan budaya yang masih dipegang teguh oleh PUS (Pasangan usia subur), Unmet Need KB banyak terjadi pada wanita yang menghadapi hambatan keuangan, pendidikan, geografis dan social.
3. Total Fertility Rate pencapaiannya tahun 2016 sebesar 2,37 berarti pencapaiannya melebihi dari target sebesar 2,2, hal ini disebabkan tingginya angka Drop Out akseptor KB.

22. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD

Total anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD pada tahun anggaran 2016 adalah Rp. 43.733.000.000,00 dimana sampai dengan akhir tahun 2016 ini realisasi atau penyerapan anggaran telah mencapai Rp. 39.681.480.537,00 (90,74%) dengan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari program ini adalah rumah sakit BLUD yang meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 untuk program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD di RSK Mata, dengan anggaran sebesar Rp. 39.433.000.000,00, dimana sampai akhir tahun 2016 realisasi anggaran sebesar Rp. 35.781.026.086,00 (90,74%), realisasi keuangan melebihi dari target karena ada peningkatan pendapatan pada RSK Mata dan realisasi fisik mencapai 100%. Sasaran dalam kegiatan ini adalah Rumah Sakit BLUD RSK Mata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- b. Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD di RSK Paru, dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,00, dimana sampai akhir tahun 2016 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.122.768.518,00 (89,22%) dan realisasi fisik mencapai 100%. Sasaran dalam kegiatan ini adalah Rumah Sakit BLUD RSK Paru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD di RS Gigi dan Mulut, dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00, dimana sampai akhir tahun 2016 realisasi anggaran sebesar Rp. 777.685.933,00 (97,21%) dan realisasi fisik mencapai 100%. Sasaran dalam kegiatan ini adalah Rumah Sakit BLUD RS Gigi dan Mulut dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

B. REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI (APBN)

Total anggaran yang diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 64.754.805.000,00 dengan realisasi anggarannya mencapai Rp. 40.003.277.327,00 atau sebesar 61,85%. Untuk realisasi fisik dari program dan kegiatan yang dibiayai APBN telah mencapai 71,80%.

Sementara realisasi pelaksanaan per program dan per kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersumber dari anggaran Dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Kesehatan

Total anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Kesehatan sebesar Rp. 3.410.700.000,00, dengan realisasi anggarannya sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp. 2.611.191.750,00 (77,36%), dengan realisasi fisiknya mencapai 96,77%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 jenis kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kementrian Kesehatan, memiliki pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 205.400.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 113.507.400,00, (55,26%), dan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Sasaran kegiatan adalah tersedianya laporan kegiatan dan pembinaan kepegawaian.
- b. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, memiliki pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 136.500.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.484.000,00 (11,34%), dan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Sasaran kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan dan barang milik negara.
- c. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.791.800.000,00, dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.497.423.050,00 (83,57%) dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi Kementrian Kesehatan berupa rapat koordinasi teknis perencanaan program, pelaksanaan Rakerkesnas, Rakontek DAK, penyusunan laporan program pembangunan kesehatan dan layanan perkantoran.
- d. Pengelolaan Data dan Informasi, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 851.600.000,00, dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 727.515.200,00 (85,43%) dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyusunan profil kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015.
- e. Peningkatan Kesehatan Jama'ah Haji, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 245.000.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

104.090.000,00 (42,49%) dan realisasi fisik mencapai 42,63%. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jama'ah Haji berupa Layanan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Bidang Kesehatan.

2. Program Penguatan Pelaksanaan Kesehatan Nasional

Total anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Penguatan Pelaksanaan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 1.604.163.000,00, dengan realisasi anggarannya sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp. 1.148.659.800,00 (71,60%), dengan realisasi fisiknya mencapai 100%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 jenis kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.604.163.000,00, dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.148.659.800,00 (71,60%) dan realisasi fisiknya telah mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya program jaminan kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan.

3. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Total anggaran yang telah dialokasikan untuk program kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2016 adalah Rp. 1.891.488.000,00, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp. 1.759.826.053,00 (93,04%), dengan realisasi fisiknya mencapai 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, memiliki pagu anggaran sebesar Rp.271.476.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp.251.830.600,00, (92,76%), dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pelayanan Kefarmasian.
- b. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 743.417.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp. 698.337.253,00, (93,94%), dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan laporan ketersediaan obat dan alat kesehatan dan biaya operasional instansi farmasi.
- c. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 467.730.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp.432.998.000,00, (92,57%), dan realisasi fisik mencapai 100,00%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pelaporan dan perizinan distribusi kefarmasian.

- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alkes, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 201.496.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp. 187.763.200,00, (93,18%), dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya profil kefarmasian dan alkes, dokumen perencanaan, pengelolaan dab, evaluasi bidang kefarmasian dan alat kesehatan.
- e. Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dalam Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 80.941.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp. 72.740.000,00, (89,87%), dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah Memberikan layanan perizinan di bidang Pra Pemasaran Alat Kesehatan
- f. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dalam Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 126.428.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp. 116.157.000,00, (91,88%), dan realisasi fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Alkes dan PKRT.

4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Total anggaran yang telah dialokasikan untuk program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan adalah Rp. 9.984.615.000,00, dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp. 6.972.625.700,00 (69,84%), dengan realisasi fisiknya mencapai 76,26%. Sasaran dari program ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit dan meningkatnya kondisi lingkungan masyarakat, sesuai dengan standar yang ada, terutama tersedianya sarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 pada program ini adalah :

- a. Pembinaan Surveilans dan Karantina Kesehatan, memiliki pagu anggaran sebesar Rp.2.889.399.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp.2.392.669.600,00, (82,81%), dan realisasi fisik mencapai 86,69%. Sasaran dari kegiatan ini adalah penemuan kasus Non Polio AFP pada penduduk usia < 15 tahun, penguatan system kewaspadaan dini KLB Penyakit, kasus discarded campak dan capaian cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap.
- b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 1.780.883.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.256.412.100,00, (70,55%), dan realisasi fisik mencapai 84,74%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan kegiatan IR DBD, cakupan penatalaksanaan kasus malaria, endemis rabies yang melakukan pengendalian rabies, sosialisasi/ koordinasi POMP Filariasis pada Kab/Kota dan Surveilans / pengendalian vektor.

- c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2.202.849.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.429.001.200,00, (64,87%), dan realisasi fisik mencapai 70,40%. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan kegiatan pengendalian Kasus HIV, TB, Diare, Pneumonia Balita dan Hepatitis.
- d. Pengendalian Penyakit Tidak Menular, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2.711.484.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.563.598.700,00, (57,67%), dan realisasi fisik mencapai 62,26%. Sasaran dari kegiatan ini adalah Pengembangan SDM, Komunikasi, informasi dan edukasi KTR, Monitoring factor resiko PTM melalui Posbindu PTM, deteksi dini kanker serviks dan payudara.
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, memiliki pagu anggaran Rp.400.000.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 sebesar Rp. 330.944.100,00 (82,74%), dengan realisasi fisiknya mencapai 87,95%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah dokumen perencanaan dan anggaran, laporan keuangan dan laporan aset negara.

5. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Total anggaran yang telah dialokasikan untuk program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 35.948.130.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2016, total realisasi anggaran untuk program tersebut sebesar Rp. 19.817.479.936,00 (55,13%), dengan realisasi fisiknya mencapai 62,63%. Sasaran dari kegiatan ini adalah menurunkan angka kejadian gizi buruk dan gizi kurang serta meningkatnya kondisi gizi masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat di bidang gizi, menurunkan angka kematian ibu dan anak, Upaya kesehatan kerja dan olahraga, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan penyehatan lingkungan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Anggaran tersebut diatas digunakan untuk melaksanakan 6 jenis kegiatan selama tahun 2015, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembinaan Gizi Masyarakat, memiliki pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 7.394.710.000,00. Realisasi keuangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 5.354.631.855,00 (72,41%), dengan realisasi fisiknya mencapai 94,25%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah meningkatkan kapasitas dalam pembinaan gizi masyarakat, evaluasi dalam pembinaan gizi masyarakat, sistem informasi dan surveilans pembinaan gizi masyarakat.

- b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, memiliki pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp.2.265.000.000,00. Realisasi keuangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp1.465.546.100,00 (64,70%), dengan realisasi fisiknya mencapai 71,84%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah penyediaan dokumen perencanaan program dan penganggaran, pengelola data dan informasi dan evaluasi pelaporan
- c. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, memiliki pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 3.095.550.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.753.687.300,00 (56,65%), dengan realisasi fisiknya mencapai 70,94%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah kegiatan pembinaan, bimtek dan evaluasi pembiayaan Upaya kesehatan kerja dan olahraga.
- d. Pembinaan Kesehatan Keluarga, memiliki pagu anggaran sebesar Rp.13.298.012.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 6.774.536.320,00 (50,94%), dengan realisasi fisiknya mencapai 50,90%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah penyusunan laporan kegiatan dan pembinaan kesehatan keluarga.
- e. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.795.384.000,00, dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.926.356.361,00 (50,76%) dan realisasi fisiknya telah mencapai 55,68%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah koordinasi, sosialisasi, advokasi, bimtek dan evaluasi dalam rangka peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dukungan sarana dan prasarana melalui berbagai media.
- f. Penyehatan Lingkungan, , dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.099.474.000,00, dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 2.542.722.000,00 (41,69%) dan realisasi fisiknya telah mencapai 46,33%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah kapasitas SDM, bimtek dan evaluasi, system informasi dan surveilans penyehatan lingkungan.

6. Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Total anggaran yang telah dialokasikan untuk program pembinaan upaya kesehatan pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 5.834.157.000,00, dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2016 adalah Rp. 2.800.628.608,00 (48%), dengan realisasi fisiknya mencapai 54,21%. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya upaya pelayanan kesehatan, termasuk meningkatnya mutu pelayanan kesehatan.

Anggaran tersebut diatas digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan ,memiliki pagu anggaran sebesar Rp.862.943.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 adalah sebesar

Rp.489.806.900,00 (56,76%) dengan realisasi fisiknya mencapai 62%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah bimtek , supervisi dan pembinaan pelayanan kesehatan.

- b. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 413.088.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 114.021.600,00 (27,60%) dengan realisasi fisiknya mencapai 29%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah Pembinaan mutu pelayanan kesehatan primer
- c. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, memiliki pagu anggaran sebesar Rp.827.901.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp.347.933.300,00 (42,03%) dengan realisasi fisiknya mencapai 51%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah Pembinaan bidang pelayanan kesehatan rujukan.
- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan, memiliki pagu anggaran sebesar Rp.1.550.624.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 915.793.808,00 (59,06%), dengan realisasi fisiknya mencapai 68,72%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah laporan pembinaan program dan rencana kerja, layanan perkantoran.
- e. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 1.381.601.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 394.333.400,00 (28,54%) dengan realisasi fisiknya mencapai 32,44%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah Pembinaan bidang pelayanan kesehatan tradisional.
- f. Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, , memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 798.000.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 538.739.600,00 (67,51%) dengan realisasi fisiknya mencapai 70%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah Pembinaan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan.

7. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

Total anggaran yang telah dialokasikan untuk program pembinaan upaya kesehatan pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 6.081.552.000,00, dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2016 adalah Rp. 4.892.865.480,00 (80,76%), dengan realisasi

fisiknya mencapai 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tenaga kesehatan yang memiliki STR, SDM kesehatan yang dilatih, perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan dan data & informasi Program PPSDM..

Anggaran tersebut diatas digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Mutu SDM Kesehatan ,memiliki pagu anggaran sebesar Rp.1.045.420.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 912.300.000,00 (87,27%) dengan realisasi fisiknya mencapai 100%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah Tenaga Kesehatan yang memiliki STR.
- b. Pelatihan SDM Kesehatan, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 3.295.216.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.352.378.480.,00 (71,39%) dengan realisasi fisiknya mencapai 100%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah SDM Kesehatan yang dilatih dan perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan.
- c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 539.116.000,00, dengan realisasi keuangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 504.587.000.,00 (93,60%) dengan realisasi fisiknya mencapai 100%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah Data dan informasi Program PPSDM Kesehatan.

3.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

2.3.1 Permasalahan

Secara umum, pencapaian indikator program kesehatan pada tahun 2016 ini sudah dapat mencapai target yang ditetapkan serta terlihat adanya peningkatan pencapaian indikator program kesehatan dari tahun ke tahun. Namun demikian ada beberapa hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan pada tahun 2016. Hambatan tersebut antara lainnya adalah lambatnya pengesahan APBD Perubahan tahun 2016, dimana APBD Perubahan tahun 2016 baru bisa ditetapkan pada minggu ke-empat bulan Oktober. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan baru yang bersifat pengadaan dan rehabilitasi/pembangunan fisik pada APBD Perubahan tidak dapat dilaksanakan mengingat waktu pengerjaan yang tidak memungkinkan. Selain itu beberapa kegiatan yang mengalami revisi pada saat APBD Perubahan juga mengalami keterlambatan pelaksanaannya.

Selain permasalahan tersebut diatas masih rendahnya alokasi anggaran kesehatan yang ada baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dimana alokasi anggaran kesehatan masih belum mencapai 10% dari total APBD diluar gaji sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sementara untuk bidang kesehatan masih sangat dibutuhkan alokasi anggaran kesehatan yang cukup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, terutama dengan semakin kompleks dan rumitnya

permasalahan yang dihadapi merupakan salah satu kendala yang dihadapi serta sangat bervariasi kemampuan keuangan di tingkat kabupaten/kota.

Masih belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan dengan baik juga perlu mendapatkan perhatian, terutama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sampai ke tingkat pelayanan kesehatan terendah. Sampai saat ini pada tingkat Puskesmas, masih ada Puskesmas yang belum memiliki tenaga dokter. Pada tingkat Desa, pembangunan Poskesdes dan penempatan Bidan di Desa perlu menjadi perhatian, terutama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Di tingkat rumah sakit masih ada beberapa rumah sakit yang belum memiliki tenaga sesuai standar. Selain jumlah tenaga kesehatan yang kurang, penyebarannya pun tidak merata, terjadi penumpukan tenaga kesehatan di daerah perkotaan. Selain itu kualitas tenaga kesehatan pun belum sepenuhnya baik dan sesuai dengan standar kompetensi.

Dilihat dari fasilitas pelayanan kesehatan sampai tahun 2016 sudah melebihi dari target yaitu sekitar 28 persen rumah sakit yang terakreditasi versi 2012, sedangkan ditingkat Puskesmas sudah mencapai 8,3 persen. Belum tercapainya akreditasi puskesmas dikarenakan puskesmas masih dalam tahap penyusunan dokumen dan masih dalam implementasi dokumen akreditasi puskesmas.

Dari sisi *Demand*, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Kurangnya perhatian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat menyebabkan meningkatnya kejadian penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit Jantung Koroner, Stroke, Hipertensi dan Diabetes Mellitus. Selain kesadaran hidup sehat yang masih kurang, akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan juga masih terbatas. Baik karena masalah transportasi maupun ketersediaan pembiayaan jaminan kesehatan.

Belum adanya Klinik Sanitasi untuk kegiatan tersebut, disamping alat penunjang seperti alat peraga dan dana operasional untuk klinik sanitasi. Tidak tersedianya alat penunjang Kesling seperti Sanitarian Kit, Food Kit dan water Test kit yang dapat membantu tenaga sanitarian dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Proses pembuatan tentang peraturan kawasan tanpa rokok di daerah tinggal 4 Kabupaten yang belum punya PERDA.

Keterlambatan pengiriman laporan program dari kabupaten/kota ke provinsi juga masih menjadi kendala. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas teknologi informasi dan seringnya terjadi mutasi tenaga kesehatan, sehingga informasi-informasi yang seharusnya bisa dihasilkan bagi pengambilan kebijakan pada tingkat provinsi juga menjadi terhambat.

i. Solusi

Solusi dari permasalahan diatas antara lain dengan mempercepat proses penyerapan anggaran, membuat *time schedule* pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk pada triwulan ke-empat / akhir tahun.

Dibutuhkan juga komitmen Pemerintah Daerah agar anggaran kesehatan dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan program-program kesehatan yang strategis dapat terpenuhi. Upaya advokasi dari tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya masih harus terus dilakukan.

Penyediaan tenaga kesehatan juga harus menjadi prioritas bersama, termasuk untuk pemerataan penyebaran tenaga kesehatan tersebut. Pada sisi lain sumber daya yang ada masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga masih diperlukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan yang ada, terutama pelatihan dan pendidikan yang bersifat teknis kesehatan. Berbagai upaya untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan terus dilakukan termasuk diantaranya adalah melaksanakan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan pada akhirnya akan dapat menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Selain itu, penilaian atau akreditasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan juga terus dilaksanakan.

Untuk mempercepat proses pelaporan dan arus informasi dari Kabupaten/Kota ke Provinsi telah dibentuk tim pengelola SIK (Sistem Informasi Kesehatan) yang diharapkan akan dapat membantu pemecahan masalah ini. Berbagai fasilitas untuk mempercepat akses dan komunikasi data juga harus disediakan

2.4. PENUTUP

Demikianlah laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Januari 2017
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan

Dra. Lesty Nurainy, Apt, M. Kes
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 196207031989032002